

**DINAMIKA KOLABORASI PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR
KOREA FIGHTER X / INDONESIA FIGHTER X (KFX/IFX) INDONESIA
DENGAN KOREA SELATAN TAHUN 2018**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD ARVIN RIZQULLAH

21323034

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

**DINAMIKA KOLABORASI PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR
KOREA FIGHTER X / INDONESIA FIGHTER X (KFX/IFX) INDONESIA
DENGAN KOREA SELATAN TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD ARVIN RIZQULLAH

21323034

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Dinamika Kolaborasi Pengembangan Pesawat Tempur *Korea Fighter X/Indonesia Fighter X (KFX/IFX)* Indonesia Dengan Korea Selatan Tahun 2018
SKRIPSI

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.
- 3 Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Masukkan tanggal, 13 Mei 2026



Muhammad Arvin Rizaullah
Tanda tangan dan nama lengkap mahasiswa

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	17
1.8 Metode Penelitian	18
1.8.1 Jenis Penelitian	18
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	18
1.8.4 Proses Penelitian	19
1.9 Sistematika Pembahasan	20
BAB 2	21
2.1 Dinamika Pertahanan Nasional Indonesia dan tantangan dalam proyek KFX/IFX	21
2.1.1 Tantangan Strategis Pertahanan Indonesia	23
2.2 Permasalahan Proyek Pertahanan KFX/IFX Mengenai Pendanaan, Pengembangan SDM, dan Tukar Teknologi di Tahun 2018	25
2.2.1 Permasalahan Pendanaan Proyek KFX/IFX Tahun 2018	26
2.2.2 Tantangan Indonesia dalam pengembangan SDM pada proyek KFX/IFX di tahun 2018.....	27
2.2.3 Permasalahan Transfer Teknologi (Technological Transfer) pada proyek KFX/IFX di tahun 2018	29
BAB 3	31
3.1 Dampak Sistem Internasional terhadap Politik dalam Negeri	31
3.1.1 International Economy	33

3.1.2 <i>International State System</i>	37
3.2 Struktur Domestik terhadap Sistem Internasional	40
3.2.1 <i>Pola Rezim (Regime Type) dan Relevansinya dalam Penundaan Proyek KFX/IFX</i>	41
3.2.2 <i>Pola Koalisi (Coalition Pattern) Stakeholder Terhadap Proyek KFX/IFX</i>	43
BAB 4	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Rekomendasi	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Hasil Analisis Alur Logika (Bagan Hasil Analisis)	53
Tabel 2. Hubungan Sistem Internasional dan Struktur Domestik	54

DAFTAR SINGKATAN

AESA	: <i>Active Electronically Scanned Array</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AS	: Amerika Serikat
BVR	: <i>Beyond Visual Range</i>
CDR	: <i>Critical Design Review</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DTSS	: <i>Defense Technology Security System</i>
EMD	: <i>Engineering, Manufacturing, and Development</i>
EMDP	: <i>Engineering and Manufacturing Development Phase</i>
EOTGP	: <i>Electronic Optics Targeting Pod</i>
HI	: Hubungan Internasional
IFX	: <i>Indonesia Fighter X</i>
IRST	: <i>Infrared Search and Track</i>
KAI	: <i>Korean Aerospace Industries</i>
Kemhan RI	: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
KFX	: <i>Korea Fighter X</i>
KFX/IFX	: <i>Korea Fighter X / Indonesia Fighter X</i>
LCS	: Laut Cina Selatan
MEF	: <i>Minimum Essential Force</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PTDI	: PT Dirgantara Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia

TDP : *Technology Development Phase*

TNI AU : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penundaan kolaborasi pengembangan pesawat tempur Korea Fighter X/Indonesia Fighter X (KFX/IFX) antara Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 2018. Proyek KFX/IFX merupakan kerja sama strategis di bidang pertahanan yang bertujuan meningkatkan kemandirian alutsista udara Indonesia melalui pengembangan pesawat tempur generasi 4,5. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada penundaan proyek. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran *The Second Image Reversed* dari Peter Gourevitch, yang menekankan pengaruh sistem internasional terhadap dinamika politik domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui data sekunder. Argumen penelitian ini menyatakan bahwa penundaan proyek KFX/IFX pada tahun 2018 merupakan hasil interaksi antara tekanan ekonomi internasional, sistem negara internasional, dan respons politik domestik Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pendanaan, hambatan transfer teknologi akibat intervensi pihak ketiga, serta tantangan pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor utama penundaan, meskipun komitmen strategis Indonesia terhadap proyek tetap berlanjut.

Kata kunci: KFX/IFX, kerja sama pertahanan, *The Second Image Reversed*, politik domestik, sistem internasional

ABSTRACT

*This study examines the postponement of the Korea Fighter X/Indonesia Fighter X (KFX/IFX) fighter jet development collaboration between Indonesia and South Korea in 2018. The KFX/IFX project represents a strategic defense partnership aimed at enhancing Indonesia's air power capability and fostering defense industrial independence through the development of a 4.5-generation fighter aircraft. However, the project experienced several obstacles that led to delays in its implementation. This research applies Peter Gourevitch's *The Second Image Reversed* framework, which emphasizes the influence of the international system on domestic political dynamics. Using a qualitative approach based on secondary data analysis, this study argues that the postponement of the KFX/IFX project was not solely driven by domestic factors, but rather by the interaction between international economic pressures, the international state system, and Indonesia's domestic political responses. The findings indicate that financial constraints, restrictions on technology transfer due to third-party intervention, and challenges in human resource development were the primary factors contributing to the delay, despite Indonesia's continued strategic commitment to the project.*

Keywords: KFX/IFX, defense cooperation, *The Second Image Reversed*, domestic politics, international system

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara di dunia memiliki kewajiban dan keharusan dalam menjaga wilayah kedaulatannya demi menjaga keamanan dan kedamaian di wilayahnya masing-masing, tak terkecuali Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas terkhusus wilayah udaranya, oleh karena itu perlu diingat bahwa TNI AU berperan penting dalam menjaga wilayah udara yang luas ini. Saat ini TNI AU memiliki urgensi dalam peremajaan serta pengembangan alutsista yang dimiliki teruntuk pesawat tempur mengingat kondisi armada pesawat yang ada sudah mulai usang dari segi teknologi, kapabilitas tempur, suku cadang hingga persenjataan dan sudah memasuki masa purna penugasan sehingga bisa dikatakan TNI AU belum siap menghadapi ancaman jika perang Asia-Pasifik pecah seperti yang diucapkan oleh Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra saat Rapim TNI AU beberapa waktu yang lalu (Christian Nababan 2024).

Indonesia juga melakukan kontrak pembelian beberapa alutsista pertahanan udara yang diakuisisi dari negara lain beberapanya adalah kontrak pembelian 12 pesawat bekas Mirage 2000- 5 dari Angkatan Udara Qatar, F-15EX dari Amerika Serikat, dan 42 Dassault Rafale dari Perancis (Tim Redaksi CNBC Indonesia 2024). Oleh karena itu penting untuk diingat lagi bagi Indonesia untuk meningkatkan kemandirian dalam pertahanan dengan cara menjalin kerjasama dengan negara lain dalam proses pengembangan dan perancangan pesawat tempur baru demi untuk mengikuti perkembangan teknologi pertahanan terkini. Dan

salah satu aspek penting dalam sistem pertahanan udara adalah kesiapan dan ketersediaan pesawat tempur yang dapat diandalkan. Namun, pengembangan pesawat tempur sendiri membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi teknologi, sumber daya manusia, maupun pendanaan.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan pesawat tempur modern, Indonesia menjalin kolaborasi dengan Korea Selatan dalam proyek pengembangan pesawat tempur KFX/IFX yang dikerjakan oleh PT Dirgantara dan *Korean Aerospace Industries*, kolaborasi pembuatan pesawat tempur semi siluman ini merupakan langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara masing-masing, sekaligus memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan. Proyek ini merupakan program pengembangan pesawat tempur baru yakni generasi 4,5 yang di bangun secara bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan. Proyek pengembangan pesawat tempur ini diharapkan dapat menjadi pondasi kekuatan udara kedua negara terutama Indonesia di masa yang akan datang, menggantikan pesawat tempur lama yang sudah tertinggal zaman. Dengan teknologi yang mutakhir, KFX/IFX ini diharapkan sanggup dalam menghadapi ancaman-ancaman udara modern dengan lebih efektif.

Ada beberapa teknologi canggih yang disematkan di pesawat ini untuk menunjang penugasan pada era sekarang seperti *Electronically Scanned Array (AES)* radar, *infrared search and track (IRST)*, *electronic optics targeting pod (EOTGP)* and *Radio Frequency jammer*, selain itu juga dilengkapi radar yang mampu menangkap pergerakan musuh dari segala penjuru dengan jarak yang cukup jauh dan kemampuan ini biasa dikenal dengan *BVR (Beyond Visual Range)*,

selain itu juga dilengkapi oleh *optical targeting system* yang berfungsi sebagai mata dengan kemampuan menangkap beberapa lawan sekaligus (Sucipto 2021).

Pengembangan KFX/IFX di tengah dinamika lingkungan strategis global yang semakin high tech, high cost, dan high risk terkait pengembangan teknologi keantariksaan membutuhkan pendanaan yang signifikan, seperti yang dipaparkan dalam acara "*KF-21/IF-X The Future of Indonesia-Korea Partnership in Technology*". Kesepakatan Pendanaan dibagi menjadi 3 bagian, Pemerintah Korea 60%, 20% adalah PT. KAI (*Korea Aerospace Industries*), dan 20% adalah Indonesia (Sajidah 2023).

Pilihan Indonesia untuk bekerja sama dengan Korea Selatan didasari oleh beberapa argumen krusial. Pertama, Korea Selatan dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki posisi serupa dengan Indonesia sebagai kekuatan menengah (*middle power*), sehingga kemitraan yang terjalin bersifat setara dan bukan sekadar hubungan donor-penerima. Kedua, kerja sama ini menawarkan peluang transfer teknologi yang lebih luas dibandingkan dengan produsen alutsista dari negara-negara Barat lainnya, yang sering kali memberikan pembatasan ketat pada akses teknologi inti. Ketiga, keberhasilan kolaborasi sebelumnya dalam pengadaan kapal selam kelas Chang Bogo dan pesawat latih jet T-50 *Golden Eagle* telah membangun kepercayaan bilateral yang kokoh antara Jakarta dan Seoul (KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 2015).

Namun, pada tahun 2018, proyek strategis ini menghadapi dinamika yang berujung pada penundaan. Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan adanya kebutuhan untuk melakukan renegotiasi kontrak. Berdasarkan pernyataan resmi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)

Wiranto pada 19 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk melakukan negosiasi ulang guna meringankan posisi Indonesia terkait pembiayaan proyek di tengah kondisi ekonomi nasional yang menantang. Penundaan ini secara teknis disebut sebagai langkah untuk "melambat-lambatin" proses guna menyesuaikan dengan kapasitas fiskal negara, tanpa bermaksud membatalkan proyek tersebut secara keseluruhan. Data menunjukkan bahwa pada periode tersebut, Indonesia mengalami keterlambatan pembayaran kontribusi tahunan mencapai ratusan juta dolar Amerika, yang dipicu oleh tidak teralokasikannya anggaran secara penuh dalam APBN 2016 dan 2017. Oleh karena itu, penambahan data resmi ini memperkuat dasar argumen bahwa penundaan proyek bukan sekadar masalah teknis, melainkan keputusan politik yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi global (Kemenko Polhukam, 2018).

Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan transfer teknologi, namun juga kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan, produksi, serta pemeliharaan pesawat. Kedua negara berkontribusi dalam hal sumber daya manusia, fasilitas produksi, dan pendanaan sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Dengan demikian, kedua negara dapat saling mengisi kekurangan dan memanfaatkan kelebihan masing-masing dalam pengembangan pesawat tempur ini. Meskipun kolaborasi ini cukup menjanjikan banyak manfaat bagi Indonesia, terdapat kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Salah satu kendala utama ialah mengenai transfer teknologi dan pendanaan pengembangan SDM yang berkompeten dalam bidang ini. Dalam hal pendanaan, Indonesia baru membayar sebesar 13% dari total yang disepakati dalam *Cost Share Agreement* yaitu 20%.

Untuk mengurangi beban APBN dan menghemat cadangan devisa, sejak tahun 2018 Indonesia mencari cara untuk negosiasi ulang dengan pihak Korea Selatan dengan harapan dapat menurunkan cost sharing menjadi 15%. Akan tetapi Korea Selatan hanya memperbolehkan pengurangan biaya menjadi 18,8% (Sari 2021). Kehadiran Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pada peluncuran prototipe jet tempur KFX/IFX di Korea Selatan menunjukkan “sinyal positif” bahwa Indonesia masih memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan proyek. Melanjutkan proyek Di pihak Korea, proyek jet tempur KFX/IFX merupakan proyek militer terbesar negara, dan Indonesia menjadi satu-satunya mitra dalam pengembangan proyek alutsista tersebut. Mengingat pentingnya proyek ini bagi kedua negara, negosiasi ulang masih mungkin dilakukan (Sari 2021).

Komitmen Indonesia untuk melanjutkan proyek KFX/IFX adalah yang kuat dan sejauh ini kebijakan mengenai kerjasama program tersebut tidak berubah. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam hal ini, seperti yang disebutkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI) Letjen TNI Ediwan Prabowo. Indonesia juga berkomitmen tetap bekerja sama dengan Korea Selatan dalam pengadaan pesawat tempur KFX-IFX, seperti yang dikatakan oleh Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Marsma Dedy Laksmono. Pemerintah Indonesia juga harus melanjutkan kerja sama dengan Korea Selatan dalam pengembangan jet tempur KF-21 *Boramae* atau *Korea Fighter X* (KFX) dan *Indonesia Fighter X* (IFX), yang diketahui bernilai 8,8 triliun won atau sekitar Rp 100 triliun (Kementrian Pertahanan Indonesia 2015). Telah diuraikan urgensi Indonesia dalam meningkatkan kemandirian pertahanan udaranya melalui

kolaborasi dengan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis global yang semakin kompleks, proyek ini menjadi strategis bagi kedua negara dalam memperkuat kemampuan pertahanan udara mereka.

Meskipun menghadapi tantangan seperti transfer teknologi dan pendanaan, komitmen kuat dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proyek ini telah terbukti. Dalam konteks ini, partisipasi Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan komitmen penuh pemerintah Indonesia menggarisbawahi pentingnya proyek ini bagi kedaulatan negara. Dengan progres yang telah dicapai dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, kerjasama ini diharapkan dapat membawa manfaat jangka panjang bagi pertahanan udara Indonesia, serta memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Dengan demikian, penutup ini mencerminkan kesungguhan Indonesia dalam memperkuat pertahanan udaranya melalui kerjasama internasional yang strategis.

Dengan kerjasama yang kokoh antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur KFX/IFX, harapan untuk pertahanan udara Indonesia kedepannya menjadi semakin besar. Diharapkan bahwa dengan kehadiran pesawat tempur generasi 4,5 yang dilengkapi dengan teknologi canggih, Indonesia akan mampu menjaga kedaulatannya dengan lebih efektif di tengah dinamika lingkungan strategis global yang semakin kompleks. Selain itu, diharapkan bahwa kerjasama ini akan membawa transfer teknologi yang signifikan bagi Indonesia, meningkatkan kemampuan SDM dalam industri pertahanan, serta membuka peluang kerjasama lebih lanjut dalam pengembangan alutsista yang lain. Melalui komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan

penuh dari TNI AU, Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih mandiri dalam industri pertahanan udara, serta memperkuat posisinya dalam menjaga stabilitas keamanan regional. Dengan demikian, harapan untuk pertahanan udara Indonesia kedepannya adalah menjadi lebih tangguh, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan-tantangan masa depan dengan keyakinan yang lebih besar.

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan Indonesia dapat memperkuat kemandirian dalam perkembangan teknologi alutsista pertahanan udara dengan melalui kerjasama bilateral dengan negara yang lebih berpengalaman, agar harapannya kedepannya Indonesia mampu secara penuh mandiri perihal pengembangan alutsista udaranya, selain itu penulis mengharapkan TNI AU dapat menempuh kestabilan pertahanan udara nasional secara komprehensif di masa depan agar siap akan ancaman yang akan datang serta siap menjaga wilayah kedaulatan NKRI mengingat Indonesia memiliki wilayah udara yang luas.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Kolaborasi Pengembangan Pesawat Tempur *Korean Fighter X / Indonesia Fighter X (KFX/IFX)* tertunda dengan Korea Selatan pada tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi Indonesia dalam kolaborasi pengembangan pesawat tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan serta merumuskan strategi untuk mengatasinya.

2. Untuk menganalisis peran kemitraan Indonesia-Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur KFX/IFX dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan dan industri pertahanan kedua negara

1.4 Cakupan Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan berfokus kepada kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia yang ada di tahun 2015 - 2018, yakni beberapa terkait mengenai terjadinya penundaan proyek KFX/IFX ini yang disebabkan oleh masalah finansial pemerintah Indonesia dan transfer teknologi yang terhambat, hingga kendala SDM yang dihadapi Indonesia. Meskipun penelitian mencakup perkembangan sejak tahun 2015 untuk memberikan konteks terhadap dinamika kerja sama, fokus utama analisis diarahkan pada kondisi yang terjadi pada tahun 2018. Tahun tersebut menjadi momentum krusial karena munculnya berbagai hambatan yang berdampak pada keberlanjutan partisipasi Indonesia dalam proyek.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama ini berjudul “Kepentingan Indonesia Melakukan Kerjasama Militer Dengan Korea Selatan Dalam Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX” yang dibuat oleh Gilang Ibnu Afiff dan penelitian ini membahas tentang Indonesia dan Korea Selatan memperkuat hubungan mereka dengan mengembangkan bersama pesawat tempur KFX/IFX, yang akan memenuhi kebutuhan pertahanan kedua negara dalam 30-40 tahun ke depan. Proyek ini, awalnya digagas pada tahun 2001, akan menggantikan pesawat-pesawat tua dan memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan F-16. Korea menanggung 60%

biaya, dengan *Korea Aerospace Industries* 20% dan Indonesia 20%. Nota kesepahaman ditandatangani pada 15 Juli 2010, dengan target penyelesaian pada tahun 2020.

Industri pertahanan Korea Selatan mengalami kemajuan signifikan sejak tahun 1970-an, didorong oleh ancaman Korea Utara dan kebutuhan akan kemandirian militer. Konsolidasi industri pesawat terbang menghasilkan terbentuknya KAI pada 1999. Indonesia, melalui PT. Dirgantara Indonesia (dulu IPTN), menjadi mitra dalam proyek ini. Fase awal proyek dimulai dengan penandatanganan perjanjian pada 6 Oktober 2014, dengan pembagian biaya 80% Korea dan 20% Indonesia.

Kerja sama ini juga mencakup transfer teknologi, yang memungkinkan insinyur Indonesia belajar membuat pesawat tempur sendiri. Indonesia akan menanggung 20% biaya pengembangan fase *EMD (Engineering, Manufacturing, and Development)* sebesar US\$1.33 miliar dari total US\$6.7 miliar. Pembayaran dimulai pada April 2016 dan berlangsung hingga 2025. Proyek KFX/IFX diharapkan mampu meningkatkan pertahanan dan kemandirian teknologi militer kedua negara (Afiff 2016).

Penelitian kedua ini berjudul “Kerja sama Internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX” yang dibuat oleh Yohanes Purwanto yang membahas tentang kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan dimulai pada tahun 2008, terdiri dari tiga tahap: *Technology Development Phase (TDP)*, *Engineering and Manufacture Development Phase (EMDP)*, dan *Production Phase (PP)*. Proyek ini sempat mengalami penundaan beberapa kali, terutama pada tahun 2013, 2015,

dan 2016, karena masalah pendanaan dan perubahan kepemimpinan. Namun, kerja sama ini tetap dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pembagian biaya pada Januari 2016, senilai 1,3 miliar dolar AS. Rencananya, delapan prototipe akan dibuat, dengan enam dapat diterbangkan dan dua untuk uji struktur, dengan target prototipe pertama selesai pada 2021 (Purwanto 2022, 164-170).

Penelitian ketiga ini berjudul “Peran Diplomasi Pertahanan dalam Implementasi Kebijakan kerjasama Program KFX/IFX Indonesia–Korea Selatan” yang dibuat oleh Indra Nurrohman. Penelitian ini menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi Indonesia dalam proyek pengembangan pesawat ini seperti pemenuhan *sharing cost* yang belum ditepati oleh pemerintahan Indonesia dan Pada tahun 2018, program kolaborasi KFX/IFX mengalami kendala bagi kedua pihak yang berpartisipasi. Di pihak Korea, rencana tersebut terkendala oleh audit terhadap belanja anggaran yang digunakan pada tahap *TDP*. Di sisi lain, di pihak Indonesia, akibat pergantian presiden pada tahun 2014, kelanjutan program tidak dievaluasi, dan terdapat kendala dalam pengamanan anggaran proyek sehingga menghambat pelaksanaan program. Adanya hambatan-hambatan tersebut tentunya akan memperlambat dan menghambat kemajuan kerja sama kedua negara sehingga mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan pada setiap tahapannya (Nurrohman, Gunawan, and Sumarlan 2019, 48-65) .

Kesimpulan dari ketiga penelitian tentang kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur KFX/IFX menunjukkan bahwa proyek ini merupakan inisiatif strategis yang dimulai sejak tahun 2001 dengan tujuan menggantikan pesawat tempur lama dan meningkatkan kemandirian teknologi militer kedua negara. Korea Selatan menanggung 60% biaya, sementara

Indonesia dan *Korea Aerospace Industries* masing-masing menanggung 20%. Proyek ini melibatkan transfer teknologi yang penting bagi insinyur Indonesia. Namun, berbagai kendala seperti masalah pendanaan, dan kendala administrasi seringkali menghambat kemajuan proyek. Meskipun beberapa kali mengalami penundaan, kerja sama ini tetap dilanjutkan dengan target penyelesaian beberapa prototipe pada tahun 2021. Penelitian ini akan membahas lebih dalam dan berfokus terhadap kendala di dalam proyek KFX/IFX tersebut yang dialami oleh Indonesia yang ada di tahun 2018.

1.6 Kerangka Pemikiran

The Second Image Reversed

Dalam ranah disiplin ilmu politik, terutama yang berkaitan dengan Hubungan Internasional (HI) dan politik komparatif, terdapat dikotomi yang telah lama memisahkan fokus analisis. Secara tradisional, para ahli HI cenderung melihat struktur domestik suatu negara seperti sistem politik, birokrasi, atau komposisi sosial sebagai variabel independen yang membantu menjelaskan kebijakan luar negerinya dan interaksi dalam sistem internasional (Gourevitch 1978, 881). Misalnya, sebuah negara demokratis dianggap akan berperilaku berbeda di panggung dunia dibandingkan dengan negara otoriter. Sebaliknya, para ahli politik komparatif lebih menaruh perhatian pada dinamika internal, berupaya menjelaskan mengapa sebuah negara memiliki struktur domestik tertentu, bagaimana struktur itu terbentuk, dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan internal, seperti distribusi pendapatan atau pertumbuhan ekonomi (Gourevitch 1978, 881).

Peter Gourevitch, dalam tulisannya yang berpengaruh, "*The Second Image Reversed: The International Sources of Domestic Politics*," berupaya menjembatani dan secara fundamental menantang pemisahan ini. Karya ini dapat dipahami sebagai sebuah respon langsung terhadap kerangka analisis tiga level yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz, dimana Waltz mengidentifikasi "citra kedua" (*the second image*) sebagai dinamika internal negara yang menjelaskan mengapa perang terjadi (Gourevitch 1978, 881-882). Gourevitch tidak hanya sekedar mengkritik; ia membalikkan premis tersebut dengan argumen tandingan yang provokatif: bahwa sistem internasional alih-alih menjadi sekadar produk dari politik domestik bertindak sebagai penyebab (variabel independen) yang secara kuat membentuk politik dan struktur internal suatu negara (variabel dependen) (Gourevitch 1978, 882).

Peter Gourevitch dalam teorinya *The Second Image Reversed* menjelaskan bahwa politik domestik suatu negara tidak hanya memengaruhi sistem internasional, tetapi justru sering kali terbentuk karena tekanan eksternal. Dengan kata lain, sistem internasional berperan sebagai variabel independen, sementara struktur domestik negara menjadi variabel dependen (Gourevitch 1978, 882).

Argumen inti Gourevitch berpusat pada premis bahwa sistem internasional adalah kekuatan kausal yang menentukan dalam membentuk politik domestik. Ia secara eksplisit menempatkan sistem internasional sebagai variabel independen dan struktur internal—seperti jenis rezim dan pola koalisi—sebagai variabel dependen (Gourevitch 1978, 882). Menurutnya, cara suatu negara terorganisir di dalam tidak semata-mata merupakan manifestasi dari dinamika internal,

melainkan juga hasil dari adaptasi, respons, atau paksaan yang berasal dari lingkungan eksternal.

Gourevitch mengidentifikasi dua aspek kunci dari sistem internasional yang memiliki dampak paling kuat terhadap karakter rezim domestik. Dua aspek ini secara sederhana ia sebut sebagai perang dan perdagangan, atau dalam bahasa yang lebih akademis, (*International State System*) sistem negara internasional (yang terkait dengan distribusi kekuasaan politik-militer) dan (*International Economy*) ekonomi internasional (yang terkait dengan distribusi aktivitas ekonomi dan kekayaan) (Gourevitch 1978, 883). Gourevitch berpendapat bahwa, serupa dengan pasar yang memberikan hukuman atau penghargaan, lingkungan internasional memberikan tekanan yang memaksa negara-negara untuk mengorganisir diri secara internal guna memenuhi tantangan atau memanfaatkan peluang eksternal (Gourevitch 1978, 883). Negara-negara yang tidak mampu beradaptasi dengan tekanan ini berisiko mengalami perubahan fundamental pada struktur internal mereka, termasuk kehancuran rezim atau perubahan koalisi yang berkuasa.

Dalam menganalisis dampak dari tekanan eksternal ini, Gourevitch membatasi variabel dependennya pada dua hasil yang dianggapnya paling signifikan dan tahan lama dalam suatu sistem politik (Gourevitch 1978, 883). Pertama adalah tipe rezim, yang mencakup berbagai bentuk pemerintahan seperti konstitusionalisme versus otoritarianisme, demokrasi borjuis versus fasisme, atau sistem presidensial versus parlementer. Kedua adalah pola koalisi, yang merujuk pada komposisi dan hubungan antara elit-elit dominan dalam suatu masyarakat, seperti pemilik properti, birokrat, militer, atau pemimpin serikat pekerja

(Gourevitch 1978, 883). Gourevitch memandang tipe rezim dan pola koalisi sebagai fitur-fitur yang membentuk perilaku politik seiring waktu, memengaruhi pengambilan keputusan pada momen-momen krusial dalam sejarah suatu negara (Gourevitch 1978, 883). Dengan berfokus pada variabel-variabel yang bertahan lama ini, Gourevitch memberikan analisis yang jauh lebih dalam daripada sekadar mengamati respons kebijakan jangka pendek, menyoroti bagaimana tekanan eksternal dapat membentuk arsitektur politik yang fundamental.

International Economy: Dampak Ekonomi Internasional pada Struktur Politik Domestik

International Economy yaitu distribusi aktivitas ekonomi dan kekayaan di tingkat global. Perubahan dalam pasar dunia, krisis ekonomi, atau ketergantungan perdagangan dapat memaksa negara melakukan penyesuaian politik dan institusional agar mampu bertahan dan tetap kompetitif (Gourevitch 1978, 883). Gourevitch meninjau berbagai kajian yang menyatakan bahwa dinamika ekonomi internasional berperan penting dalam memengaruhi politik dalam negeri. Ia membagi kajian tersebut ke dalam sejumlah aliran pemikiran, yang masing-masing memiliki corak argumen tersendiri.

International State System: Dampak Sistem Negara Internasional pada Struktur Politik Domestik

Selain ekonomi internasional, Gourevitch juga menyoroti peran sentral dari sistem negara internasional, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keamanan, perang, dan geopolitik, dalam membentuk struktur politik internal suatu negara. Ia

berpendapat bahwa ancaman dan peluang yang diciptakan oleh anarki internasional memaksa negara untuk mengorganisasi diri secara internal agar dapat bertahan dan berkembang. *International State System* juga bisa diartikan sebagai distribusi kekuatan politik dan militer antarnegara. Bentuk tekanan ini bisa berupa kompetisi militer, ancaman perang, maupun dinamika keamanan global yang mendorong negara menyesuaikan struktur internalnya.

Domestic Politics

Tekanan eksternal tersebut akan membentuk dua aspek utama dalam politik domestik, yakni:

(1) Tipe Rezim (*Regime Type*)

meliputi apakah suatu negara menganut sistem demokratis, otoriter, parlementer, atau presidensial. Pilihan bentuk rezim sering kali merupakan respons terhadap kondisi internasional, misalnya tekanan keamanan atau tuntutan ekonomi global.

(2) Pola Koalisi (*Coalition Pattern*)

yaitu konfigurasi kekuatan sosial-politik di dalam negeri, seperti hubungan antara militer, birokrasi, pemilik modal, serikat pekerja, dan elit politik lainnya. Tekanan dari luar dapat mengubah keseimbangan koalisi ini, sehingga menghasilkan aliansi baru yang lebih sesuai dengan tuntutan eksternal (Gourevitch 1978, 883).

Diagram 1. Hubungan Sistem Internasional dan Politik Domestik dalam Perspektif *The Second Image Reversed*

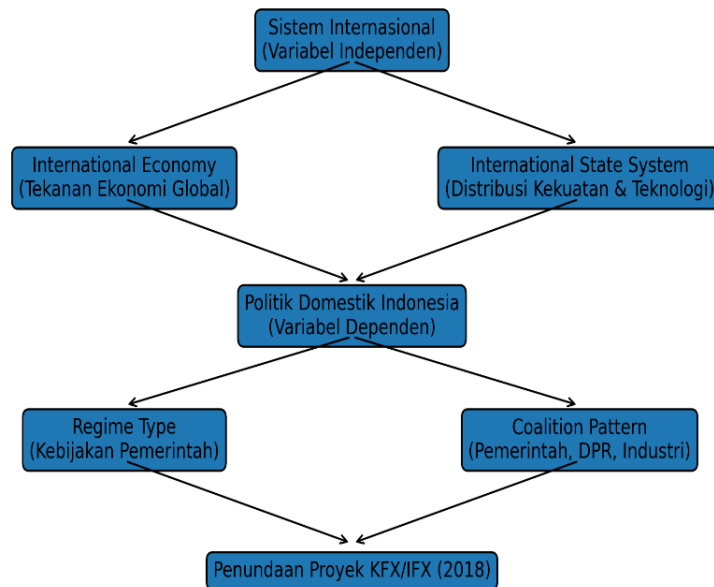


Diagram diatas merupakan diagram kerangka pemikiran dari *The Second Image Reversed* (Gourevitch, 1978).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif *The Second Image Reversed* untuk menjelaskan bagaimana sistem internasional mempengaruhi dinamika politik domestik suatu negara. Dalam konteks penelitian ini, sistem internasional berperan sebagai variabel independen yang terdiri dari dua aspek utama, yaitu *international economy* dan *international state system*. Kedua faktor tersebut memberikan tekanan eksternal yang kemudian mempengaruhi politik domestik Indonesia, khususnya dalam bentuk kebijakan pemerintah dan konfigurasi aktor politik yang terlibat dalam proyek KFX/IFX. Interaksi antara tekanan eksternal dan respons politik domestik tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap penundaan proyek pengembangan pesawat tempur

KFX/IFX pada tahun 2018, yang tercermin melalui kendala pendanaan, hambatan transfer teknologi, serta tantangan pengembangan sumber daya manusia.

1.7 Argumen Sementara

Penundaan kolaborasi pengembangan pesawat tempur KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 2018 dipengaruhi oleh tekanan sistem internasional yang kemudian memengaruhi dinamika politik domestik Indonesia. Mengacu pada perspektif *The Second Image Reversed* dari Peter Gourevitch, sistem internasional dapat menjadi variabel independen yang membentuk respons kebijakan domestik suatu negara. Dalam konteks penelitian ini, tekanan tersebut muncul melalui dua indikator utama yaitu *international economy* dan *international state system* yang kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kelanjutan proyek KFX/IFX (Gourevitch, 1978).

Tekanan *international economy* tercermin dari keterbatasan kapasitas fiskal Indonesia yang berdampak pada keterlambatan pembayaran kontribusi proyek serta upaya renegosiasi skema pembagian biaya. Sementara itu, tekanan *international state system* terlihat dari dinamika geopolitik dan intervensi pihak ketiga yang mempengaruhi proses transfer teknologi dalam proyek tersebut. Kedua tekanan eksternal tersebut kemudian dimediasi oleh dinamika politik domestik Indonesia, khususnya melalui *regime type* dan *coalition pattern* yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, penundaan proyek KFX/IFX pada tahun 2018 dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara tekanan sistem internasional dan respons politik domestik Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif, alasannya karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dan holistik mengenai kolaborasi pengembangan pesawat tempur KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi lebih dalam terhadap konteks, dinamika, dan proses yang terlibat, termasuk peran, tantangan, dan strategi yang digunakan oleh kedua negara. Metode ini juga membantu menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan dan memberikan wawasan mengenai implikasi kebijakan serta hubungan bilateral. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dianggap paling tepat untuk mengevaluasi kompleksitas dan nuansa kolaborasi ini dalam kerangka kebijakan pertahanan yang lebih luas.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintahan Indonesia dan Korea Selatan dan objek dalam penelitian ini adalah proyek kolaborasi pengembangan pesawat tempur KFX/IFX dengan demikian penelitian ini dapat dilaksanakan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yang dimana akan diperoleh penulis melalui jurnal, artikel, atau bahkan sumber informasi yang kredibel. Penelitian ini pantas menggunakan metode pengumpulan data sekunder karena melibatkan analisis data dan informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya tentang kolaborasi pertahanan dan pengembangan pesawat tempur antara Indonesia dan Korea

Selatan. Data sekunder memungkinkan penulis untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang konteks, tantangan, dan manfaat dari proyek KFX/IFX.

1.8.4 Proses Penelitian

Langkah awal dalam proses penelitian ini adalah penulis akan melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber data relevan yang diperoleh, dengan mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan mencari literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, artikel, laporan, dan dokumen resmi terkait kolaborasi KFX/IFX. Data sekunder yang telah dipublikasikan sebelumnya dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Tahap berikutnya adalah penggalian perspektif pemangku kepentingan, yaitu menelaah berbagai sudut pandang dari pemerintah, industri pertahanan, dan ahli strategi untuk menggali wawasan mengenai implikasi kebijakan, manfaat, dan tantangan dari proyek kolaborasi ini.

Penelitian ini juga menilai implikasi kebijakan dan hubungan bilateral dengan menganalisis dampak kolaborasi KFX/IFX terhadap kebijakan pertahanan Indonesia dan Korea Selatan, serta bagaimana proyek ini mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara dalam konteks yang lebih luas. Hasil penelitian kemudian disusun dalam bentuk laporan yang sistematis dan terstruktur, dengan menyajikan temuan penelitian secara jelas dan komprehensif, serta menyertakan rekomendasi yang relevan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penulis membuat penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang mana menjabarkan:

BAB I: Pada bagian awal penelitian ini penulis menjelaskan mengenai pendahuluan dan latar belakang daripada proyek pengembangan pesawat KFX/IFX yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan

BAB II: Pada bagian ini penulis menjelaskan lebih lanjut terkait urgensi pertahanan Indonesia serta permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam proyek ini

BAB III: Pada bagian ini penulis akan memberi penjelasan terkait dinamika penundaan maupun kendala yang dihadapi Indonesia di dalam proyek KFX/IFX ini dengan mengaitkan kerangka pemikiran yang sudah dijabarkan

BAB IV: Penulis akan memberikan kesimpulan dan solusi untuk proyek yang dilakukan oleh kedua negara ini dengan berfokus pada Indonesia

BAB 2

KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PROYEK PERTAHANAN PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR KFX/IFX

Melanjutkan dari pembahasan BAB sebelumnya, pada BAB 2 ini penulis akan menjabarkan terkait dinamika dan penundaan proyek kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan ini pada tahun 2018. Diawali dengan menjelaskan urgensi pertahanan Indonesia dan dilanjutkan dengan menjelaskan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proyek KFX/IFX ini yang menyebabkan penundaan di tahun 2018.

2.1 Dinamika Pertahanan Nasional Indonesia dan tantangan dalam proyek *KFX/IFX*

Pertahanan nasional adalah unsur fundamental bagi keberlangsungan negara dalam menjamin kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional. Dalam konteks global yang semakin dinamis, Indonesia menghadapi tantangan pertahanan yang kompleks, mulai dari peningkatan kekuatan militer negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik, persaingan teknologi militer, hingga potensi konflik terbuka di wilayah Laut Cina Selatan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga wilayah udaranya yang luas, menjadikan kekuatan udara sebagai salah satu prioritas utama dalam sistem pertahanan nasional.

Proyek pengembangan pesawat tempur KFX/IFX yang dilakukan bersama Korea Selatan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kemandirian alutsista Indonesia. Proyek ini tidak hanya penting dari sisi penguatan postur militer, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pada pengembangan teknologi nasional, transfer teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia di sektor pertahanan. Namun, implementasi proyek ini tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti keterlambatan pendanaan dari Indonesia, kendala dalam realisasi

transfer teknologi, serta kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan industri pertahanan dalam negeri untuk menyerap teknologi canggih. Perubahan kebijakan politik dan fluktuasi komitmen nasional juga menjadi hambatan signifikan dalam keberlangsungan proyek.

Ketahanan nasional merupakan pilar utama eksistensi suatu negara, khususnya bagi Indonesia. Konsep ini esensial untuk menjamin dan memperkuat kemampuan bangsa dalam menjaga persatuan, menghadapi berbagai bentuk ancaman, serta mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional tidak hanya berdimensi kolektif, melainkan juga berakar pada ketahanan individu dan keluarga, yang secara kumulatif membentuk kekuatan penangkalan terhadap potensi gangguan (Sari et al. 2024, 81-90).

Pertahanan negara merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, bukan hanya domain militer semata. Untuk membangun fondasi pertahanan yang kokoh, diperlukan pemikiran yang kritis dan ilmiah, serta pengayaan khasanah keilmuan manajemen pertahanan. Urgensi ini semakin terasa mengingat Indonesia harus menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya dari spektrum ancaman yang luas, mencakup baik ancaman militer konvensional maupun ancaman non-militer yang lebih asimetris (Huda, Iswantono, and Kristin 2024).

Partisipasi masyarakat dalam ketahanan nasional dan bela negara melampaui keterlibatan fisik dalam angkatan bersenjata. Aspek non-fisik mencakup spektrum tindakan sipil yang luas, seperti keikutsertaan dalam pendidikan kewarganegaraan, penerapan nilai-nilai demokrasi dengan menghormati perbedaan pendapat, pengabdian tulus terhadap lingkungan, kontribusi nyata bagi kemanusiaan demi kemajuan bangsa, peran aktif dalam mengatasi ancaman non-militer (misalnya, menjadi sukarelawan dalam penanganan bencana alam), upaya menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma Indonesia, hingga pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara (Sari et al. 2024, 81-90). Dimensi partisipasi yang luas ini menyoroti aspek humanis

dari pertahanan nasional, di mana kesejahteraan dan stabilitas nasional dijaga melalui kontribusi beragam dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks ancaman modern, urgensi ketahanan nasional semakin ditekankan dalam menghadapi fenomena seperti *proxy war*. Konflik jenis ini memerlukan penanaman rasa cinta tanah air yang mendalam dan semangat perjuangan yang tak padam di kalangan masyarakat (Putri Chandra 2025). Ancaman ini menunjukkan bahwa spektrum ancaman telah berevolusi melampaui agresi militer tradisional, mencakup bentuk-bentuk konflik yang lebih terselubung dan kompleks. Oleh karena itu, kebutuhan akan kapabilitas pertahanan yang canggih, seperti yang diupayakan melalui proyek KFX/IFX, tidak hanya bertujuan untuk menangkal musuh konvensional, tetapi juga untuk mempertahankan keunggulan strategis dalam lanskap ancaman yang terus berubah, dimana batas antara ancaman militer dan non-militer semakin kabur. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk investasi dalam proyek pertahanan berteknologi tinggi.

2.1.1 Tantangan Strategis Pertahanan Indonesia

Indonesia menghadapi konstelasi tantangan strategis yang kompleks, baik dari dinamika geopolitik global maupun kondisi internal. Di tingkat global dan regional, perkembangan geopolitik yang dinamis menjadi perhatian utama, termasuk sengketa Laut Cina Selatan (LCS) yang persisten, krisis di Myanmar, rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, kemunculan aliansi baru seperti AUKUS, hingga dampak dari krisis Ukraina (Sari 2022). Dinamika kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepentingan strategis Indonesia (Prihartono 2022).

Secara internal, kondisi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang dimiliki Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Jumlah alutsista yang tersedia belum memenuhi target *Minimum Essential Force* (MEF) yang ideal, dan sebagian besar dari alutsista yang ada telah berusia lebih dari 25 tahun, yang mengakibatkan kinerja operasional yang suboptimal. Laporan *the Military Balance* 2022 dari *International Institute for Strategic Studies* bahkan mengindikasikan bahwa hanya sekitar 40% dari total alutsista Indonesia yang siap digunakan dalam operasi. Kondisi ini secara langsung berdampak pada penurunan kesiapan tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan meningkatkan risiko keselamatan personel yang mengoperasikannya (Sari 2022).

Program MEF Indonesia, yang dibagi dalam tiga fase (Fase I: 2010-2014, Fase II: 2015-2019, dan Fase III: 2020-2024), belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pada MEF Fase I, capaian hanya sekitar 54,97% dari target 57,24%. Demikian pula, pada MEF Fase II, hingga Oktober 2019, capaian baru mencapai 63,19% dari target 75,54%. Keterbatasan anggaran dan panjangnya proses perencanaan kebutuhan serta pengadaan alutsista menjadi penyebab utama di balik kegagalan pencapaian target ini. Kesenjangan kapabilitas yang terungkap dari data ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk modernisasi alutsista (Sari 2022).

Kondisi armada yang menua dan target MEF yang belum terpenuhi secara signifikan menciptakan celah kapabilitas yang berdampak langsung pada kesiapan operasional TNI dan keselamatan personel. Kelemahan internal ini, ditambah dengan ancaman geopolitik eksternal yang dinamis, seperti sengketa LCS, rivalitas AS-Tiongkok, dan kehadiran AUKUS, menciptakan dorongan kuat untuk modernisasi. Proyek KFX/IFX dapat dipandang sebagai respons langsung terhadap celah kapabilitas ini, dengan tujuan mengakuisisi kemampuan modern yang saat ini belum dimiliki Indonesia, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan posisi tawar Indonesia dalam dinamika politik global.

Pengembangan industri pertahanan domestik juga menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks. Untuk mencapai kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan alutsista,

diperlukan sinergi yang kuat dari berbagai lini utama, khususnya dalam hal riset dan pengembangan teknologi (Widyatmoko, Almubaroq, and Saragih 2022). Meskipun pemerintah telah berupaya untuk membeli alutsista produksi domestik dan bahkan melakukan ekspor, kapasitas industri pertahanan nasional masih memerlukan peningkatan signifikan. Kompleksitas tantangan industri pertahanan dalam konteks kemandirian ini menunjukkan bahwa pengembangan industri pertahanan yang mandiri membutuhkan sinergi yang komprehensif, terutama dalam riset dan pengembangan teknologi. Ini bukan sekadar tentang membeli perangkat keras, melainkan tentang membangun basis industri yang mampu berinovasi secara mandiri. Kegagalan pencapaian target MEF yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan proses perencanaan serta pengadaan yang memakan waktu lama menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya finansial, tetapi juga efisiensi dan visi strategis dari ekosistem pengadaan dan pengembangan. Ini mengindikasikan bahwa proyek KFX/IFX, meskipun merupakan kolaborasi, juga menjadi ujian dan platform pengembangan bagi kapabilitas industri dan R&D Indonesia sendiri, menghadapi kesulitan inherent dalam sektor yang menuntut investasi besar dan waktu pengerjaan yang panjang (Sari 2022).

2.2 Permasalahan Proyek Pertahanan KFX/IFX Mengenai Pendanaan, Pengembangan SDM, dan Tukar Teknologi di Tahun 2018

Bagian ini akan menggali tantangan spesifik yang dihadapi proyek KFX/IFX pada tahun 2018, dengan fokus pada tiga area kritis: pendanaan, pengembangan sumber daya manusia, dan transfer teknologi. Tahun 2018 merupakan periode penting di mana isu-isu ini menjadi sangat menonjol, memengaruhi kemajuan proyek dan hubungan kolaboratif antara Indonesia dan Korea Selatan.

2.2.1 Permasalahan Pendanaan Proyek KFX/IFX Tahun 2018

Pada tahun 2018, proyek KFX/IFX menghadapi kendala pendanaan yang signifikan, yang berakar pada keterlambatan pembayaran kewajiban Indonesia. Pada tahun 2017, Indonesia tercatat terlambat dalam memenuhi kontribusi tahunan pembiayaan program KFX/IFX sebesar US\$124,5 juta (Fitri 2018, 25-29). Keterlambatan ini disebabkan oleh tidak dianggarkannya pembiayaan program tersebut oleh Kementerian Pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 dan 2017. Padahal, telah ada kesepakatan awal bahwa Indonesia akan berkontribusi 1% dari total biaya program setiap tahun, yang kemudian meningkat menjadi lebih dari 2% mulai tahun 2017. Keterlambatan pembayaran yang berulang sejak tahun 2017, ditambah dengan fakta bahwa Kementerian Pertahanan tidak menganggarkan dana untuk program tersebut, sangat mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara komitmen finansial awal (20% dari total biaya) dengan kapasitas fiskal aktual Indonesia atau prioritas anggaran yang bersaing. Ini bukan sekadar keterlambatan sederhana; hal ini menunjukkan masalah yang lebih dalam terkait perencanaan finansial dan komitmen.

Menyikapi tekanan finansial ini, Pemerintah Indonesia berulang kali mengajukan renegotiasi sejak masa Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (2014-2019). Indonesia meminta penurunan pembagian ongkos program menjadi 15 persen dari porsi awal 20% yang disepakati (Ismiyatun and Pramudhipta 2025, 150-162). Di sisi lain, pemerintah Korea Selatan hanya menyetujui renegotiasi pembagian ongkos kontrak di angka 18,8 persen, menunjukkan adanya selisih pandang yang belum terselesaikan. Pada Mei 2018, Indonesia juga menyampaikan keluhan terkait aturan kontrak mengenai manfaat teknis dan lisensi ekspor, dan mengumumkan niatnya untuk merenegosiasi program guna mendapatkan bagian yang lebih besar dari produksi lokal dan hak ekspor. Upaya renegotiasi yang gigih ini, yang berupaya mengurangi porsi biaya dari 20% menjadi 15% (meskipun Korea Selatan hanya menyetujui 18,8%), semakin menggarisbawahi kesulitan finansial yang signifikan yang dapat

membahayakan kelangsungan proyek jangka panjang dan kepercayaan antara kedua mitra. Ini menyoroti tantangan kritis dalam mengelola proyek pertahanan berskala besar dan multi-tahun, terutama bagi negara berkembang.

Permasalahan pendanaan ini tidak luput dari perhatian legislatif Indonesia. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengkritisi isu ini pada Juli 2018, mendesak agar program ini tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara dan tetap mematuhi kaidah undang-undang yang berlaku (Fitri 2018,25-29). Meskipun terdapat ketidaksepakatan yang mencolok, Kementerian Pertahanan Indonesia pada saat itu tetap menyatakan harapan agar program KFX/IFX dapat terus berlanjut. Permasalahan pendanaan ini dengan cepat meningkat menjadi tantangan politik dan diplomatik. Proyek ini, yang awalnya merupakan simbol kerja sama bilateral yang kuat, justru menjadi sumber ketegangan. Kebutuhan untuk renegotiasi pembagian biaya dan hak ekspor menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pemahaman awal atau pergeseran dalam persepsi manfaat oleh pihak Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana ketidaksepakatan finansial dapat mengikis fondasi kepercayaan dan keuntungan bersama dalam kolaborasi pertahanan internasional, berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik yang lebih luas di luar proyek itu sendiri.

2.2.2 Tantangan Indonesia dalam pengembangan SDM pada proyek KFX/IFX di tahun 2018

Pengembangan sumber daya manusia merupakan komponen krusial dalam keberhasilan proyek KFX/IFX, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2014 tentang penyiapan sumber daya nasional (Presiden RI and Kementerian Pertahanan 2014). Pemerintah Indonesia telah melakukan investasi yang signifikan dalam aspek ini, termasuk melalui rekrutmen tenaga ahli, peningkatan kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan, serta pemberian insentif bagi peneliti dan perekayasa di bidang terkait.⁹ Sebagai wujud konkret dari komitmen ini, Indonesia telah mengirimkan 300 ahli dari PT Dirgantara

Indonesia (PTDI) ke Korea Selatan pada tahun 2016 untuk mengikuti program pengembangan KFX/IFX selama empat tahun.

Namun, investasi besar dalam pengembangan SDM ini menghadapi ancaman serius dari potensi penundaan proyek. Sebuah artikel menekankan bahwa investasi dalam pembangunan infrastruktur dan kapasitas SDM untuk proyek KFX/IFX akan sia-sia jika kelanjutan program tertunda (Presiden RI and Kementerian Pertahanan 2014) Meskipun ada laporan mengenai kembalinya teknisi PTDI ke Indonesia pada Maret (yang terjadi setelah tahun 2018, sebagian besar karena pandemi COVID-19), insiden ini menyoroti kerentanan SDM terhadap faktor eksternal dan internal proyek. Setelah periode tersebut, para teknisi tersebut kembali bersiap untuk dikerahkan kembali ke Korea Selatan.

Risiko *de-skilling* atau brain drain akibat penundaan proyek menjadi perhatian utama. Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2014 secara jelas menguraikan pentingnya strategis pengembangan sumber daya manusia untuk program IF-X. Pengerahan 300 ahli PTDI merupakan investasi yang substansial. Namun, peringatan bahwa "investasi dalam infrastruktur dan kapasitas SDM untuk proyek KFX/IFX akan sia-sia jika kelanjutan program tertunda" mengindikasikan risiko kritis: penundaan yang berkepanjangan dalam kemajuan proyek dapat menyebabkan hilangnya keterampilan yang telah diperoleh atau bahkan perpindahan personel terlatih ke peluang lain. Hal ini merusak tujuan jangka panjang penguasaan teknologi dan kemandirian, karena modal manusia, yang sulit dan mahal untuk dibangun, mungkin tidak dapat dimanfaatkan atau dipertahankan secara efektif.

Selain itu, terdapat keterkaitan erat antara pengembangan SDM dengan keberhasilan alih teknologi. Jika transfer teknologi inti dibatasi atau dihambat, seperti yang akan dibahas lebih lanjut, para ahli Indonesia yang telah dilatih dengan intensif mungkin tidak akan memperoleh akses ke pengetahuan paling krusial atau pengalaman praktis yang memadai. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi tingkat "penguasaan teknologi" yang sebenarnya ingin

dicapai oleh program.⁹ Situasi ini menciptakan skenario di mana Indonesia berinvestasi besar dalam pelatihan personel, tetapi potensi penuh dari pelatihan tersebut terhambat oleh kendala eksternal pada teknologi yang seharusnya mereka kuasai, yang dapat menyebabkan frustrasi dan inefisiensi.

2.2.3 Permasalahan Transfer Teknologi (Technological Transfer) pada proyek KFX/IFX di tahun 2018

Salah satu permasalahan paling krusial yang membayangi proyek KFX/IFX pada tahun 2018 adalah isu tukar teknologi, terutama yang berkaitan dengan pembatasan lisensi dari Amerika Serikat (AS).⁷ AS secara eksplisit tidak menyetujui transfer empat teknologi inti yang sangat vital untuk pengembangan pesawat tempur modern, yaitu *AESA Radar*, *Infrared Search and Track* (IRST), *Electronic Optics Targeting Pod* (EOTGP), dan *Radio Frequency Jammers*.⁷ Selain itu, AS juga mensyaratkan Indonesia untuk membangun *Defense Technology Security System* (DTSS) guna memastikan keamanan pengetahuan yang dibagikan, menunjukkan adanya tingkat kehati-hatian atau kekhawatiran terkait kerahasiaan teknologi. Pembatasan ini berdampak signifikan pada manfaat yang diharapkan Indonesia dari kolaborasi ini. Menurut Kementerian Pertahanan, *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dan Korea Selatan belum sepenuhnya menguntungkan pihak Indonesia, terutama karena intervensi AS yang membatasi lisensi teknologi dalam program pembuatan pesawat tempur (Presiden RI and Kementerian Pertahanan 2014, 2-11). Padahal, salah satu tujuan utama proyek KFX/IFX adalah untuk meningkatkan kapabilitas teknologi peralatan pertahanan nasional dan memperkuat industri dirgantara domestik melalui proses alih teknologi yang komprehensif.

Kontradiksi antara tujuan proyek dan realitas pembatasan teknologi ini sangat mencolok. Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2014 secara jelas menyatakan bahwa tujuan

program adalah "penguasaan teknologi pesawat tempur" (Ismiyatun and Pramudhipta 2025, 150-162). Pernyataan ini diperkuat oleh informasi yang menyebutkan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk "meningkatkan kemampuan teknologi peralatan pertahanan nasional" dan "mendukung penguatan industri dirgantara domestik serta alih teknologi".⁸ Namun, fakta bahwa Amerika Serikat memblokir transfer empat teknologi inti menunjukkan kontradiksi langsung. Ini berarti tujuan fundamental Indonesia untuk menguasai teknologi terhambat secara serius, mengubah proyek dari transfer teknologi penuh menjadi potensi transfer parsial atau bahkan hanya akuisisi dengan perolehan pengetahuan yang terbatas. Ini merupakan pukulan telak bagi strategi kemandirian pertahanan jangka panjang Indonesia.

Meskipun menghadapi kendala serius dalam transfer teknologi, proyek KFX/IFX secara teknis menunjukkan kemajuan yang patut dicatat pada tahun 2018. Desain dasar pesawat telah berhasil diselesaikan pada Juni 2018, dan *Critical Design Review* (CDR) berhasil dilaksanakan pada 24-26 September 2018. CDR ini mengonfirmasi bahwa semua persyaratan militer telah tercermin dalam desain dan proyek siap untuk melangkah ke tahap produksi prototipe. Konfigurasi C109, yang merupakan desain prototipe KFX, juga telah diputuskan setelah sekitar dua tahun eksperimen terowongan angin yang ekstensif (Indos 2020). Dampak geopolitik eksternal terhadap kedaulatan teknologi nasional juga menjadi sangat jelas. Intervensi Amerika Serikat menyoroti bagaimana dinamika geopolitik eksternal dan kepentingan negara pihak ketiga dapat secara langsung menghambat tujuan pengembangan pertahanan suatu negara berdaulat. Persyaratan untuk membangun *Defense Technology Security System* (DTSS) lebih lanjut menggaris bawahi kurangnya kepercayaan penuh atau keinginan untuk mengontrol teknologi pertahanan yang sensitif (Indos 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kerja sama bilateral, kompleksitas industri pertahanan global dan pertimbangan politik terkait dapat menciptakan hambatan signifikan

untuk mencapai otonomi teknologi sejati, memaksa Indonesia untuk menavigasi ketergantungan yang kompleks

BAB 3

ANALISIS PENYEBAB PENUNDAAN PROYEK KFX/IFX MELALUI PERSPEKTIF

THE SECOND IMAGE REVERSED

Setelah membahas urgensi dasar Indonesia dalam proyek pertahanan ini pada bab 2, selanjutnya dalam bab ini akan menganalisis penyebab penundaan proyek kolaborasi pengembangan pesawat tempur KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 2018, dengan menerapkan kerangka teori *The Second Image Reversed* oleh Peter Gourevitch. Analisis akan dibagi menjadi dua bagian utama: dampak sistem internasional terhadap politik domestik Indonesia, dan bagaimana struktur domestik Indonesia merespon serta memediasi tekanan-tekanan internasional tersebut.

3.1 Dampak Sistem Internasional terhadap Politik dalam Negeri

Gourevitch berpendapat bahwa sistem internasional, baik melalui ekonomi internasional maupun sistem negara internasional, secara signifikan membentuk politik dan struktur domestik suatu negara. Dalam konteks proyek KFX/IFX, penundaan pada tahun 2018 dapat dipahami sebagai konsekuensi dari tekanan eksternal ini yang mempengaruhi kapasitas dan pilihan kebijakan Indonesia.

Menurut Gourevitch ada dua indikator untuk mengukur dampak sistem internasional terhadap politik dalam negeri yakni *International Economy* dan *International State System* (Gourevitch, 1978).

Dalam kerangka Peter Gourevitch, sistem internasional bukan sekadar arena interaksi antarnegara, melainkan kekuatan kausal yang mendikte struktur internal negara melalui dua mekanisme: ekonomi internasional dan sistem negara internasional. Pada tahun 2018, kedua mekanisme ini bekerja secara simultan untuk memberikan tekanan luar biasa pada proyek KFX/IFX Indonesia (Gourevitch, 1978).

Sementara itu, Kementerian Pertahanan menghadapi dilema besar di tengah keterbatasan fiskal. Dokumen rekaman program KFX/IFX mencatat bahwa kontribusi Indonesia menunggak hingga USD 140 juta pada awal 2018 dan meningkat menjadi USD 200 juta pada Juni 2018, akibat ketidaktersediaan anggaran dalam APBN 2016–2017 (KAI 2019). Ketergantungan Kemhan terhadap pendanaan dari pinjaman luar negeri yang mencapai lebih dari 85% untuk pengadaan alutsista juga memperparah situasi, karena ruang fiskal untuk mendukung program jangka panjang seperti KFX/IFX menjadi sangat terbatas. Keterlambatan penganggaran bukan hanya persoalan teknis, tetapi mencerminkan persaingan prioritas dalam APBN, di mana belanja sosial, infrastruktur, dan stabilitas makro ekonomi sering kali menggeser alokasi untuk modernisasi alutsista, terutama saat ekonomi global bergejolak.

Dalam menghadapi tunggakan tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomasi fiskal yang intensif. Kemhan secara resmi mengajukan renegotiasi porsi kontribusi dari 20% menjadi 15%, sebagai upaya menyesuaikan kemampuan ekonomi dalam negeri dengan kewajiban internasional. Meski Korea Selatan akhirnya hanya menyetujui penurunan kecil menjadi 18,8%, langkah ini menunjukkan adanya “kelonggaran respons” sebuah istilah yang digunakan Gourevitch untuk menggambarkan ruang gerak negara dalam merespons tekanan global (Kemhan RI 2023). Dalam beberapa laporan, bahkan sempat muncul wacana bahwa Indonesia mempertimbangkan keluar dari proyek, namun pemerintah akhirnya tetap menegaskan komitmennya setelah melakukan pembayaran yang tidak dipublikasikan secara rinci selama proses negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terkekang oleh kondisi

ekonomi global, pemerintah tetap berusaha menjaga posisi strategis Indonesia dalam kerja sama pertahanan jangka panjang.

Kondisi ekonomi internasional pada tahun 2018 memberikan tekanan besar terhadap kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas fiskal, khususnya dalam pembiayaan proyek strategis seperti KFX/IFX. Sejumlah faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi Tiongkok, volatilitas harga komoditas dunia, dan memanasnya perang dagang AS–Tiongkok memberikan dampak langsung terhadap perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Global Financial Markets and the Rupiah Exchange Rate, 2018). Laporan Indonesia Investment menyebutkan bahwa ketidakpastian global pada tahun 2018 meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar, menurunkan performa perdagangan, dan mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam pembiayaan proyek jangka panjang yang bernilai besar, termasuk proyek KFX/IFX (Indonesia Investment 2021). Tekanan ekonomi internasional inilah yang kemudian menjadi ujian berat bagi kemampuan Indonesia memenuhi komitmen kontribusi sebesar 20% terhadap proyek KFX/IFX.

3.1.1 *International Economy*

Menurut Gourevitch ada dua aspek penting dari lingkungan internasional yang mempengaruhi politik domestik salah satunya *International Economy* dan hal itu dipahami sebagai struktur pasar dan jaringan perdagangan global yang menghubungkan negara-negara melalui arus barang, modal, dan investasi. Bagi Gourevitch, dinamika ini tidak hanya membuka peluang pertumbuhan, tetapi juga membatasi ruang gerak kebijakan di dalam negeri. Krisis atau perubahan pasar dunia, misalnya, dapat mengguncang stabilitas politik domestik karena pemerintah harus menyesuaikan diri dengan tekanan ekonomi global. (Gourevitch 1978)

Kondisi ekonomi internasional pada tahun 2018 memainkan peran penting dalam mempengaruhi kapasitas Indonesia untuk memenuhi komitmen pendanaan proyek KFX/IFX.

Menurut Gourevitch, pembangunan politik dibentuk oleh "perang dan perdagangan". Dalam hal perdagangan atau ekonomi, ia mengkaji bagaimana kekuatan pasar dunia secara sistematis mempengaruhi konfigurasi jenis rezim dan pola koalisi (Gourevitch 1978).

Indonesia, dalam konteks pengembangan pesawat tempur canggih, dapat dikategorikan sebagai negara *late industrializer* (industrialisasi terlambat) dalam sistem ekonomi global, sebagaimana dijelaskan oleh Alexander Gerschenkron. Gerschenkron berargumen bahwa negara-negara yang berindustrialisasi terlambat menghadapi "biaya masuk yang lebih besar" karena persaingan yang sudah ada dan teknologi yang semakin kompleks dan mahal (Gourevitch, 1978).

Selain itu, pada tahun 2018, meskipun ekonomi global secara umum menunjukkan pertumbuhan yang solid dan volume perdagangan meningkat, terdapat peningkatan risiko signifikan seperti potensi "koreksi pasar lebih lanjut, pergeseran menuju kebijakan proteksionis, dan peningkatan ketegangan geopolitik". Kawasan Asia-Pasifik, meskipun menjadi mesin utama pertumbuhan global dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5,5% , menghadapi ketidakpastian yang meningkat, terutama dari moderasi ekspansi ekonomi Tiongkok yang diperkirakan melambat menjadi 6,6% pada tahun 2018 akibat pengetatan kebijakan domestik. Perlambatan ekonomi Tiongkok ini memiliki efek riak signifikan di seluruh kawasan, memengaruhi kesehatan fiskal Indonesia sebagai mitra dagang utama (International Monetary Fund 2018).

Di tengah tekanan fiskal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada di garis depan dalam menjaga kestabilan APBN. Tantangan internal dalam pengelolaan anggaran sebenarnya telah muncul bahkan sebelum 2018. Evaluasi *Public Expenditure and Financial Accountability* (PEFA) menunjukkan adanya “penyimpangan berulang” antara rencana dan realisasi anggaran negara, serta keterlambatan pembahasan RUU APBN 2018 yang

menandakan adanya hambatan birokrasi dan tarik-menarik politik dalam proses fiskal (PEFA 2017, dalam Syamsurijal 2019).

Ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas juga menjadi faktor krusial. Pada tahun 2018, harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) global mengalami penurunan signifikan sebesar 19,8% dibandingkan tahun 2017, terutama karena stok global yang lebih tinggi dan permintaan ekspor yang lebih lemah (International Monetary Fund 2018). Meskipun harga batu bara menunjukkan kekuatan dan mendorong peningkatan produksi serta ekspor dari Indonesia, kinerja ekspor non-migas Indonesia secara keseluruhan menunjukkan perlambatan, dengan beberapa ekspor komoditas utama seperti lemak/minyak hewani/nabati dan karet mengalami penurunan permintaan. Hal ini berkontribusi pada defisit perdagangan Indonesia yang signifikan, mencapai US\$11,14 miliar atau 1,07% dari PDB pada tahun 2018 (The Observatory of Economic Complexity 2023).

Indonesia juga menghadapi kendala pendanaan yang serius dalam proyek KFX/IFX ini, yang merupakan manifestasi dari tekanan ekonomi internasional ini. Indonesia tercatat terlambat dalam memenuhi kontribusi tahunan pembiayaan program KFX/IFX sebesar US\$124,5 juta pada tahun 2017, dan Kementerian Pertahanan tidak menganggarkan pembiayaan ini dalam APBN 2016 dan 2017. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen finansial awal (20% dari total biaya) dengan kapasitas fiskal aktual Indonesia, yang mungkin dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi global atau prioritas anggaran yang bersaing. Upaya Indonesia untuk merenegosiasi porsi biaya dari 20% menjadi 15% (meskipun Korea Selatan hanya menyetujui 18,8%) semakin menggarisbawahi kesulitan finansial yang signifikan ini. (Sari 2021)

Selain itu, teori dependensia atau inti-periferi yang disorot oleh Gourevitch juga relevan. Teori ini menekankan bagaimana negara-negara kapitalis maju ("inti") menetapkan persyaratan untuk modal dan teknologi, memaksa negara-negara berkembang "periferi" atau

dalam kasus Indonesia, "semi-periferi" ke dalam peran bawahan. Dalam konteks proyek KFX/IFX, keterbatasan pendanaan dan tantangan pengembangan SDM dapat dilihat sebagai konsekuensi dari posisi Indonesia dalam sistem ekonomi dunia yang didominasi oleh negara-negara inti. Meskipun Indonesia berinvestasi besar dalam pengembangan SDM dengan mengirimkan 300 ahli ke Korea Selatan, risiko *de-skilling* atau *brain drain* akibat penundaan proyek menunjukkan kerentanan modal manusia Indonesia terhadap faktor eksternal dan internal proyek. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya domestik, kendala ekonomi internasional dapat membatasi kemampuan Indonesia untuk sepenuhnya menguasai teknologi dan mengembangkan SDM secara mandiri.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika ekonomi internasional pada tahun 2018 memberikan tekanan signifikan terhadap kapasitas fiskal Indonesia dalam memenuhi komitmen pendanaan proyek KFX/IFX. Volatilitas ekonomi global yang dipicu oleh perlambatan ekonomi Tiongkok, fluktuasi harga komoditas dunia, serta meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak pada menurunnya performa perdagangan dan meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi pendapatan negara yang sebagian besar masih bergantung pada sektor komoditas, sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam membiayai proyek-proyek strategis bernilai besar. Dalam situasi tersebut, pemerintah Indonesia cenderung melakukan penyesuaian kebijakan fiskal dengan menetapkan prioritas pada program-program yang dianggap lebih mendesak bagi stabilitas ekonomi domestik. Akibatnya, komitmen pendanaan terhadap proyek KFX/IFX tidak dapat dipenuhi secara optimal dan berujung pada penundaan pembayaran kontribusi Indonesia dalam proyek tersebut. Temuan ini memperkuat argumen Peter Gourevitch bahwa sistem ekonomi internasional dapat membatasi ruang gerak kebijakan domestik suatu negara dan memaksa pemerintah melakukan penyesuaian prioritas kebijakan sebagai respons terhadap tekanan eksternal.

3.1.2 *International State System*

Sementara itu, *International State System* dimaknai sebagai susunan politik global yang terbentuk dari distribusi kekuatan di antara negara-negara. Tidak adanya otoritas pusat membuat dunia berada dalam kondisi anarki, sehingga tiap negara harus menata politik domestiknya agar mampu bertahan dari ancaman maupun memanfaatkan peluang yang datang dari luar. Posisi geografis, kekuatan militer, dan pola aliansi internasional turut membentuk cara suatu negara mengorganisasi kekuatan politik di dalam negeri. Dengan demikian, menurut Gourevitch, baik ekonomi internasional maupun sistem negara internasional adalah faktor eksternal yang secara langsung membentuk arah dan pola politik domestik di setiap negara (Gourevitch, 1978).

Sistem negara internasional (*International State System*) memberikan tekanan eksternal yang mempengaruhi dinamika politik domestik Indonesia dalam proyek KFX/IFX. Gourevitch menjelaskan bahwa "anarki" lingkungan internasional, dengan ancaman penaklukan atau subordinasi, memaksa negara untuk mengatur diri secara internal demi pertahanan (Gourevitch, 1978).

Dalam kasus KFX/IFX, intervensi pihak ketiga, khususnya Amerika Serikat (AS), merupakan contoh langsung bagaimana sistem negara internasional mempengaruhi proyek. AS secara eksplisit tidak menyetujui transfer empat teknologi inti vital (AESARadar, IRST, EOTGP, dan *Radio Frequency Jammers*) kepada Indonesia. Pembatasan ini secara langsung menghambat tujuan utama Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas teknologi pertahanan nasional dan memperkuat industri dirgantara domestik melalui alih teknologi yang komprehensif.

Gourevitch menyoroti bagaimana "pembangunan negara sebagai kebijakan luar negeri" dapat terjadi melalui tindakan sengaja satu negara terhadap negara lain, seperti kompensasi

teritorial atau, dalam kasus ini, pembatasan teknologi. Intervensi AS menunjukkan bagaimana dinamika geopolitik eksternal dan kepentingan negara pihak ketiga dapat secara langsung menghambat tujuan pengembangan pertahanan suatu negara berdaulat. Persyaratan AS agar Indonesia membangun *Defense Technology Security System* (DTSS) juga menggarisbawahi tingkat kehati-hatian atau kekhawatiran terkait kerahasiaan teknologi, yang pada gilirannya menciptakan hambatan signifikan bagi otonomi teknologi sejati Indonesia.

Meskipun proyek secara teknis menunjukkan kemajuan (penyelesaian desain dasar dan *Critical Design Review*), hambatan dalam transfer teknologi inti ini berarti tujuan fundamental Indonesia untuk menguasai teknologi terhambat secara serius, mengubah proyek dari transfer teknologi penuh menjadi potensi transfer parsial atau bahkan hanya akuisisi dengan perolehan pengetahuan yang terbatas. Hal ini menunjukkan bagaimana tekanan dari sistem negara internasional dapat memaksakan kendala yang signifikan pada kebijakan pertahanan domestik (Indos 2020).

Dalam kasus KFX/IFX, dinamika ini terlihat dari intervensi Amerika Serikat yang memblokir empat teknologi inti pesawat tempur. AS menggunakan posisinya sebagai pemegang lisensi teknologi pertahanan global untuk membatasi penyebaran teknologi sensitif kepada negara lain, termasuk Indonesia (KEMENTERIAN PERTAHANAN INDONESIA, 2017).

Sesuai dengan deskripsi indikator dalam kerangka pemikiran Gourevitch, tindakan AS ini merupakan bentuk tekanan sistemik yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuatan (*balance of power*) di kawasan (Gourevitch, 1978). Bagi Indonesia, hambatan ini menciptakan dilema strategis: terus berinvestasi pada proyek yang manfaat teknologinya dikurangi secara sepihak oleh kekuatan global, atau merenegosiasi kontrak untuk mendapatkan kepastian alih teknologi. Analisis ini sejalan dengan temuan bahwa sistem negara internasional secara langsung membentuk orientasi pertahanan domestik suatu negara berdaulat. Kesimpulannya,

hambatan teknologi dari pihak ketiga merupakan variabel eksternal yang memicu ketidaksenangan elit pertahanan domestik, yang kemudian bermuara pada keputusan untuk menghentikan sementara kontribusi finansial hingga kepastian hukum dan teknis diperoleh (Permana, 2025).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika dalam sistem negara internasional turut memberikan tekanan eksternal terhadap jalannya kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan. Dalam perspektif *The Second Image Reversed* yang dikemukakan oleh Gourevitch, struktur politik global yang bersifat anarkis memungkinkan negara-negara besar mempengaruhi kebijakan dan kemampuan negara lain melalui kontrol teknologi, aliansi strategis, maupun kepentingan geopolitik yang lebih luas (Gourevitch, 1978).

Dalam konteks proyek KFX/IFX, tekanan tersebut terlihat melalui keterlibatan pihak ketiga, khususnya Amerika Serikat, yang membatasi transfer beberapa teknologi inti seperti *AESA Radar*, *IRST*, *EOTGP*, dan *Radio Frequency Jammer* kepada Indonesia. Pembatasan ini menunjukkan bahwa pengembangan industri pertahanan nasional tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, tetapi juga oleh dinamika geopolitik yang lebih luas dalam sistem negara internasional.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proyek pengembangan alutsista strategis seperti KFX/IFX berada dalam lingkungan politik internasional yang kompleks, di mana kepentingan negara besar dan kontrol terhadap teknologi pertahanan dapat mempengaruhi ruang gerak negara berkembang dalam memperoleh alih teknologi secara penuh. Dengan demikian, sistem negara internasional berperan sebagai faktor eksternal yang membentuk konteks strategis bagi pengambilan keputusan domestik Indonesia terkait proyek KFX/IFX.

3.2 Struktur Domestik terhadap Sistem Internasional

Dalam melihat keterlambatan proyek KFX/IFX pada tahun 2018, kunci utama analisisnya terletak pada bagaimana organisasi internal negara bekerja yakni struktur politik formal, aktor-aktor yang memiliki kewenangan, serta koalisi kepentingan yang terbentuk di antara mereka. Perspektif Peter Gourevitch menekankan bahwa negara bukanlah entitas pasif yang hanya menerima tekanan dari luar; melainkan sebuah arena politik kompleks yang memiliki ruang negosiasi, bahkan di bawah tekanan ekonomi global atau dinamika geopolitik kawasan (Gourevitch 1978). Pandangan ini sangat relevan ketika Indonesia harus merespons tekanan eksternal berupa perlambatan ekonomi Tiongkok, meningkatnya ketidakpastian perdagangan global, serta dinamika keamanan Asia Timur yang dipengaruhi oleh kebijakan Amerika Serikat terhadap transfer teknologi militer semuanya tercatat sebagai faktor yang membentuk konteks penundaan kontribusi Indonesia dalam proyek KFX/IFX tahun 2018 (Indonesia Investment, 2021)

Namun Gourevitch menekankan bahwa meskipun tekanan eksternal dapat sangat kuat, sistem internasional “tidak sepenuhnya menentukan” respons suatu negara. Selalu ada *room for maneuver*, atau ruang gerak internal yang memungkinkan pemerintah memilih strategi tertentu, kecuali jika negara berada dalam situasi ekstrim seperti pendudukan militer langsung oleh kekuatan asing. Inilah yang menjelaskan mengapa Indonesia tidak serta-merta mundur dari proyek KFX/IFX meski menghadapi kesulitan fiskal. Sebaliknya, Indonesia memilih strategi renegosiasi kontribusi, bukan keluar dari proyek sebuah respons yang muncul dari proses politik domestik, bukan tekanan internasional semata (Kemhan RI, 2023)

Untuk memahami bagaimana respons itu terbentuk, Gourevitch mengajak kita melakukan analisis koalisi yaitu melihat bagaimana kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda di dalam negeri saling bersaing, bersekutu, dan mempengaruhi keputusan negara. Analisis ini penting karena arah kebijakan akhir bukan hanya ditentukan oleh struktur formal

seperti kementerian dan DPR, tetapi oleh interaksi antara kepentingan strategis, fiscal prudence, kebutuhan industri nasional, dan tekanan politik yang berkelindan di antara para aktor itu. Dengan kata lain, isi kebijakan negara muncul dari pertarungan koalisi internal bukan dari struktur global semata. Oleh karena itu, untuk memahami penundaan proyek KFX/IFX pada tahun 2018, kita perlu membongkar dua aspek yaitu pola rezim dengan pembahasan terkait bagaimana struktur politik Indonesia menyaring tekanan eksternal melalui titik veto, pembagian kewenangan, dan mekanisme anggaran. Selanjutnya pola koalisi dengan pembahasan terkait bagaimana aktor-aktor utama dalam negara membentuk aliansi kepentingan yang mendorong atau menahan proyek.

3.2.1 Pola Rezim (Regime Type) dan Relevansinya dalam Penundaan Proyek KFX/IFX

Dalam konteks proyek kolaborasi KFX/IFX, pola rezim Indonesia sebagai negara demokratis presidensial memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana tekanan ekonomi dan geopolitik internasional pada tahun 2018 diterjemahkan ke dalam keputusan domestik. Menurut Gourevitch, tipe rezim merupakan mekanisme yang menentukan cara tekanan eksternal diproses di dalam negeri, karena setiap rezim memiliki struktur kelembagaan, distribusi kewenangan, dan titik veto yang berbeda-beda (Gourevitch 1978, 883)

Pada kasus KFX/IFX, pola rezim Indonesia menciptakan arena institusional yang membuat keputusan mengenai kelanjutan atau penundaan proyek tidak hanya bergantung pada posisi eksekutif (Kemhan dan Presiden), tetapi juga pada mekanisme anggaran, prosedur akuntabilitas DPR, serta pertimbangan birokrasi ekonomi. Cara kerja pola rezim ini terlihat jelas melalui proses penyusunan dan realokasi anggaran APBN 2016–2018. Meskipun tekanan internasional seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan fluktuasi perdagangan global menekan kapasitas fiskal Indonesia, kebijakan tidak dapat diambil secara cepat atau sepihak. Sistem presidensial-demokratis Indonesia mensyaratkan bahwa setiap alokasi pendanaan luar

negeri, termasuk kontribusi proyek KFX/IFX yang bernilai besar, harus disetujui oleh DPR. Inilah yang dimaksud Gourevitch sebagai “titik veto,” yakni titik keputusan formal yang memungkinkan aktor legislatif untuk menunda, mengubah, bahkan menghalangi kebijakan tertentu dalam kondisi tekanan eksternal (Gourevitch 1978).

Pada kasus KFX/IFX, Komisi I DPR RI memanfaatkan titik veto ini. Ketika kontribusi Indonesia tertunda hingga mencapai USD 200 juta pada pertengahan 2018, DPR mengkritik Kemhan karena tidak mengalokasikan dana secara memadai di APBN 2016–2017, sehingga proses persetujuan anggaran untuk pembayaran tambahan menjadi tertunda (Syamsurijal 2019). Kritik ini tidak hanya memperlambat proses administratif, tetapi juga memperkuat tekanan politik terhadap pemerintah untuk berhati-hati dalam melanjutkan komitmen internasional. Dengan demikian, penundaan proyek KFX/IFX tahun 2018 tidak bisa dipahami hanya sebagai kegagalan fiskal atau tekanan ekonomi global, tetapi juga sebagai konsekuensi dari cara kerja pola rezim Indonesia yang membuat proses kebijakan sangat bergantung pada persetujuan multi-aktor dalam sistem demokratis.

Lebih jauh, struktur rezim juga membatasi kemampuan Kemhan untuk mengambil keputusan cepat terkait renegosiasi kontribusi dari 20% menjadi 15%. Walaupun renegosiasi dilakukan secara intensif oleh Kemhan, keputusan akhir tetap harus melewati proses birokrasi fiskal dan persetujuan DPR. Inilah yang menunjukkan bahwa pola rezim bekerja sebagai filter institusional yang memperlambat respons negara terhadap tekanan internasional, sebagaimana dijelaskan Gourevitch bahwa rezim demokratis cenderung menghasilkan respons kebijakan yang lebih lambat karena banyaknya aktor dan prosedur yang terlibat (Gourevitch 1978, 883). Dengan demikian, pola rezim Indonesia berperan langsung dalam penundaan proyek KFX/IFX: bukan karena pemerintah tidak ingin membayar, tetapi karena struktur rezim itu sendiri menciptakan hambatan domestik yang memperlambat proses pengambilan keputusan. Tekanan internasional memang hadir, tetapi hasil akhirnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana

tekanan itu diproses dalam sistem politik Indonesia yang bercirikan pembagian kekuasaan, titik veto, dan koordinasi antar lembaga yang berbelit.

Pola rezim Indonesia sebagai demokrasi presidensial mengharuskan pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif. Dalam isu KFX/IFX, DPR RI (khususnya Komisi I) berperan sebagai *veto point* dalam mekanisme anggaran APBN. Pada pertengahan tahun 2018, DPR mempertanyakan efektivitas biaya proyek tersebut mengingat adanya pembatasan teknologi dari AS. Kritik legislatif ini memaksa pemerintah untuk lebih berhati-hati dan akuntabel dalam mencairkan dana kontribusi (Defense Mirror, 2018).

Sistem presidensial menuntut adanya koordinasi lintas lembaga yang ketat sebelum komitmen keuangan besar dilaksanakan. Penundaan tahun 2018 mencerminkan bagaimana mekanisme demokratis Indonesia menunda respons cepat terhadap kewajiban internasional demi memastikan akuntabilitas fiskal di dalam negeri (Ihsanuddin & Asril, 2018).

3.2.2 Pola Koalisi (*Coalition Pattern*) Stakeholder Terhadap Proyek KFX/IFX

Pola koalisi adalah tentang kekuatan sosial dan hubungan politik di antara mereka, seperti elit politik, militer, dan kelompok industri. Dalam kerangka *The Second Image Reversed* pola koalisi domestik Indonesia pada tahun 2018 tidak terbentuk sebagai pertarungan dua kekuatan melainkan sebagai satu koalisi pemerintahan yang tersentral di bawah kepemimpinan Presiden, di mana setiap institusi negara bergerak dalam orbit prioritas fiskal dan politik yang sama. Meskipun secara formal Indonesia memiliki rezim demokrasi institusional dengan pembagian kewenangan yang jelas sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab 3.2.1, Mekanisme pembuatan keputusan pada awal periode pemerintahan Presiden Joko Widodo memperlihatkan konsolidasi kekuasaan yang kuat antar sektor negara, yang merupakan ciri utama dari praktik *authoritarian neoliberalism*. Konsolidasi ini tidak sekedar lahir dari

dominasi partai-partai pendukung pemerintah di DPR dan terbentuknya koalisi kabinet yang luas, namun juga dari penguatan otoritas eksekutif yang secara sistematis mengurangi ruang deliberasi demokratis. Karim dan Kholid menunjukkan bahwa resentralisasi kewenangan regulatif dan pengambilan keputusan strategis di tangan eksekutif berfungsi untuk mengamankan dan mempercepat agenda neoliberal pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam deregulasi dan liberalisasi investasi, dengan cara meminimalkan perlawanan dari legislatif maupun pemerintah daerah (Karim and Kholid 2025, #) . Dalam konteks ini, dominasi koalisi di parlemen tidak lagi berperan sebagai mekanisme *checks and balances*, melainkan sebagai instrumen politik yang menormalkan keputusan terpusat, sehingga respons negara terhadap tekanan internasional dibingkai dalam satu kerangka kebijakan yang homogen, teknokratis, dan relatif terinsulasi dari kontestasi politik (Mietzner 2018).

Koalisi ini memperlihatkan bahwa institusi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, DPR, TNI Angkatan Udara, dan PT Dirgantara Indonesia tidak beroperasi sebagai blok-blok terpisah. Mereka berada dalam satu garis koordinasi kebijakan publik yang ditentukan oleh prioritas pembangunan nasional, terutama visi Presiden yang pada periode 2014–2019 lebih menekankan pembangunan infrastruktur, menjaga stabilitas makro ekonomi, dan penguatan fiskal. Di bawah orientasi tersebut, sektor pertahanan tidak ditempatkan sebagai sektor dengan urgensi belanja negara yang tinggi. Hal ini tercermin dalam dokumen kebijakan fiskal pemerintah yang menunjukkan prioritas anggaran difokuskan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial (Bappenas 2019; Andrews 2020).

Sebagai institusi yang memegang kendali atas anggaran negara, Kementerian Keuangan memerankan peran sentral dalam koalisi ini. Tekanan eksternal berupa ketidakpastian perdagangan global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan depresiasi rupiah akibat penguatan dolar Amerika Serikat membuat ruang fiskal Indonesia menyempit pada

2018. IMF mencatat bahwa pelemahan pasar komoditas dunia, termasuk penurunan harga minyak kelapa sawit hampir 20 persen, memengaruhi ketahanan makro ekonomi Indonesia. Kondisi inilah yang membuat Kemenkeu memilih menerapkan kebijakan fiskal yang lebih berhati-hati, termasuk keputusan untuk menunda alokasi dana kontribusi Indonesia pada proyek KFX/IFX selama 2016–2017 (International Monetary Fund 2018).

Pada saat yang sama, Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, dan PT Dirgantara Indonesia tetap memandang proyek KFX/IFX sebagai pilar strategis dalam modernisasi pertahanan nasional. Kemhan menilai keberlanjutan proyek ini berkaitan dengan peluang jangka panjang Indonesia untuk menguasai teknologi pesawat tempur generasi 4.5. TNI AU menempatkan IFX sebagai calon pengganti armada F-5 Tiger II yang telah memasuki masa akhir operasionalnya. PTDI pun berkepentingan karena ratusan insinyurnya telah mengikuti on-the-job training di Korea Selatan sejak 2016, menjadikan proyek ini sebagai jalur vital bagi peningkatan kapabilitas industri dirgantara nasional. Namun, posisi mereka tetap berada di bawah kewenangan fiskal pusat, sehingga kepentingan sektoral ini harus disesuaikan dengan keputusan fiskal yang menjadi prioritas Presiden dan Kemenkeu (Kementerian Pertahanan RI 2023; Ismiyatun dan Pramudhipta 2025).

Dalam dinamika koalisi besar tersebut, DPR berperan sebagai lembaga yang memperhalus dan mengawasi keputusan fiskal pemerintah tanpa memposisikan dirinya sebagai oposisi. Komisi I dan Komisi XI DPR RI meminta transparansi kontribusi Indonesia terhadap proyek KFX/IFX karena pembayaran yang tertunda telah mencapai USD 124,5 juta. Namun kritik ini lebih merupakan mekanisme pengawasan normatif, bukan bentuk perlawanan terhadap kebijakan eksekutif. Sebagai bagian dari koalisi politik pendukung Presiden, DPR justru memperkuat legitimasi keputusan pemerintah untuk melakukan penundaan pembayaran serta mendorong dilakukannya renegotiasi kontribusi Indonesia dari 20 persen menjadi 15 persen pada fase Engineering Manufacturing Development (Fitri 2018; DPR RI 2019).

Karena seluruh aktor negara berada dalam satu struktur kebijakan yang terintegrasi, dinamika internal yang terjadi bukanlah bentuk pertentangan antara koalisi, melainkan proses deliberasi dalam satu wadah koalisi pemerintahan. Setiap perbedaan pandangan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, TNI AU, PTDI, dan DPR merupakan bagian dari proses harmonisasi keputusan yang berada dalam lingkup orientasi fiskal nasional. Dalam perspektif Gourevitch, tekanan internasional dalam bentuk guncangan ekonomi global telah mendorong negara untuk menata ulang prioritas domestik, dan penataan ulang tersebut diterjemahkan melalui koalisi politik tersentral yang menempatkan kestabilan anggaran sebagai prioritas utama.

Dengan demikian, penundaan kontribusi Indonesia terhadap proyek KFX/IFX pada 2018 bukanlah hasil persaingan dua koalisi yang saling bertentangan tetapi merupakan ekspresi dari keputusan terintegrasi dalam satu koalisi besar pemerintahan yang tersentral. Seluruh aktor menyadari bahwa stabilitas fiskal negara harus diprioritaskan, dan proyek KFX/IFX—betapapun strategisnya harus disesuaikan dengan kondisi makro ekonomi yang tengah menghadapi tekanan internasional. Pola koalisi semacam ini menunjukkan bagaimana struktur politik Indonesia yang terkonsolidasi memungkinkan keputusan fiskal diambil secara lebih terpusat dan responsif terhadap dinamika eksternal, sebagaimana prediksi teori *The Second Image Reversed*.

Pola koalisi merujuk pada aliansi antara aktor-aktor dominan di dalam negeri. Dalam analisis ini, terdapat dua kelompok kepentingan yang saling berinteraksi:

1. **Koalisi Strategis-Nasionalis:** Terdiri dari Kementerian Pertahanan, TNI AU, dan PTDI. Mereka menekankan urgensi keamanan dan kemandirian teknologi jangka panjang sebagai alasan untuk tetap melanjutkan proyek meskipun ada hambatan.

2. **Koalisi Fiskal-Ekonomis:** Terdiri dari Kementerian Keuangan dan tim ekonomi kepresidenan. Fokus utama mereka adalah stabilitas nilai tukar Rupiah dan efisiensi belanja negara di tengah defisit anggaran.

Penundaan proyek pada tahun 2018 merupakan titik temu atau kompromi politik antara kedua koalisi ini. Pemerintah memutuskan untuk tidak membatalkan proyek (mendukung koalisi strategis) namun dengan melakukan renegosiasi dan penundaan pembayaran (mendukung koalisi fiskal). Sinergi antara kementerian teknis dan kementerian keuangan menunjukkan bahwa kebijakan negara adalah produk dari pertarungan koalisi internal dalam merespons tekanan global (Kemenko Polhukam, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa respons Indonesia terhadap tekanan ekonomi dan geopolitik internasional tahun 2018 ditentukan oleh kekuatan relatif koalisi fiskal yang didukung oleh mekanisme pengawasan anggaran di DPR. Integrasi antara analisis subbab 3.1 dan 3.2 menunjukkan bahwa meskipun sistem internasional memberikan tekanan, struktur domestik Indonesia memiliki otonomi untuk merespons melalui strategi negosiasi ulang yang berorientasi pada kepentingan nasional yang lebih luas.

Tabel 1. Matriks Hasil Analisis Alur Logika (Bagan Hasil Analisis)

Komponen Analisis	Tekanan Internasional (Pemicu)	Respon Domestik (Proses)	Hasil kebijakan 2018
Ekonomi	Jatuhnya harga CPO & Perang Dagang AS-China	Konsolidasi fiskal Kemenkeu & BKPM	Penundaan pembayaran kontribusi US\$ 200 juta
Negara/Geopolitik	Blokade teknologi radar & avionik oleh AS	Kritik Komisi I DPR & Evaluasi Kemenhan	Pengajuan renegosiasi porsi biaya & ToT

SDM & Industri	Standar kontrol teknologi yang ketat (DTSS)	Pengiriman & penarikan sementara insinyur PTDI	Prioritas pada pengembangan infrastruktur lokal
---------------------------	---	--	---

Sumber: Hasil olahan data penelitian berdasarkan perspektif *The Second Image Reversed*

Tabel 2. Hubungan Sistem Internasional dan Struktur Domestik

Sistem Internasional	Struktur Domestik
<i>International Economy</i> • Perlambatan ekonomi Tiongkok • Volatilitas harga komoditas • Perang dagang AS–Tiongkok (2018) • Tekanan nilai tukar & ruang fiskal menyempit (Indonesia Investment 2021)	<i>Regime Type (Pola Rezim)</i> • Sistem presidensial demokrasi Indonesia • Mekanisme APBN yang ketat • DPR sebagai veto point dalam pendanaan luar negeri • Proses anggaran menunda kontribusi KFX/IFX (Syamsurijal 2019)
<i>International State System</i> • Kebijakan Pentagon (AS) membatasi transfer teknologi radar AESA,IRST, EOTGP, RF Jammer • Tekanan geopolitik di Asia Timur (AS–China) • Dinamika keamanan Indo-Pasifik	<i>Coalition pattern (Pola Koalisi)</i> • Koalisi Pro-Proyek (Kemhan, TNI AU, PTDI) • Koalisi Fiskal (Kemenkeu, DPR RI) • Konflik kepentingan menentukan lambat/cepatnya keputusan kontribusi • Penundaan kontribusi Indonesia hingga USD 200 juta pada 2018 (KAI 2019)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis dari 2018-2021

BAB 4

PENUTUP

Bab ini berfungsi sebagai puncak dari seluruh analisis yang telah dilakukan. Setelah meninjau urgensi pertahanan Indonesia dan permasalahan yang dihadapi proyek KFX/IFX pada tahun 2018 dalam Bab 2, serta menganalisisnya melalui lensa teori *The Second Image Reversed* oleh Peter Gourevitch dalam Bab 3, Bab ini akan menyajikan sintesis dari temuan-temuan kunci tersebut. Kesimpulan akan merangkum bagaimana interaksi antara tekanan eksternal dan respons politik domestik Indonesia menjelaskan penundaan proyek. Selanjutnya, Bab ini akan menawarkan serangkaian rekomendasi strategis yang relevan dan praktis, dengan mempertimbangkan perkembangan proyek terkini, untuk memastikan proyek KFX/IFX memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan pertahanan dan industri Indonesia di masa depan.

4.1 Kesimpulan

Penundaan proyek kolaborasi pengembangan pesawat tempur KFX/IFX pada tahun 2018 merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tekanan sistem internasional dan dinamika politik domestik Indonesia. Penundaan ini tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konsekuensi dari kondisi internasional yang secara langsung memengaruhi kapasitas internal negara, khususnya dalam aspek pendanaan, pengembangan sumber daya manusia, dan transfer teknologi pertahanan.

Dalam kerangka teori *The Second Image Reversed* yang dikemukakan oleh Peter Gourevitch, sistem internasional baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik menciptakan batasan struktural yang membentuk pilihan kebijakan domestik suatu negara. Namun demikian, teori ini juga menegaskan bahwa tekanan eksternal tersebut tidak bersifat deterministik, karena hasil akhirnya sangat ditentukan oleh kapasitas, preferensi, dan proses politik di dalam negeri. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa logika tersebut relevan dalam menjelaskan kasus Indonesia dalam proyek KFX/IFX.

Dari sisi ekonomi internasional, gejala ekonomi global pada tahun 2018, khususnya akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia. Penurunan harga komoditas utama seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), perlambatan perdagangan global, serta depresiasi nilai tukar Rupiah hingga mencapai titik terendah dalam dua dekade, secara langsung membatasi kapasitas fiskal pemerintah. Kondisi ini meningkatkan beban pembiayaan proyek KFX/IFX yang didenominasikan dalam dolar Amerika Serikat dan menyebabkan kesulitan serius dalam pemenuhan kewajiban kontribusi pendanaan Indonesia. Akibatnya, pemerintah terpaksa menunda pembayaran kontribusi proyek sebagai bentuk penyesuaian terhadap tekanan ekonomi global.

Selain tekanan ekonomi, sistem negara internasional juga memainkan peran penting melalui dinamika geopolitik. Intervensi Amerika Serikat sebagai pihak ketiga, khususnya dalam pembatasan transfer empat teknologi inti pesawat tempur radar *AESA*, *IRST*, *EOTGP*, dan *Radio Frequency Jammers* secara langsung menghambat tujuan utama Indonesia dalam proyek ini, yaitu penguasaan teknologi dan penguatan industri dirgantara nasional. Hambatan transfer teknologi tersebut mengubah karakter proyek dari kolaborasi alih teknologi yang komprehensif menjadi kerja sama dengan transfer pengetahuan yang terbatas, sehingga

mengurangi nilai strategis proyek bagi Indonesia dan menimbulkan ketidakpastian dalam kelanjutan kerja sama.

Meskipun demikian, tekanan internasional tersebut tidak secara otomatis menentukan kebijakan Indonesia. Sebagaimana ditekankan oleh Gourevitch, tekanan eksternal dimediasi oleh struktur politik domestik. Dalam konteks Indonesia, sistem politik demokratis dengan banyak titik veto terutama peran DPR dan Kementerian Keuangan berfungsi sebagai mekanisme penyaring yang memperlambat dan membentuk respons negara terhadap tekanan internasional. Perbedaan kepentingan antara aktor yang menekankan urgensi strategis pertahanan dan aktor yang memprioritaskan stabilitas fiskal menciptakan ketegangan dalam proses pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan untuk melakukan penundaan dan renegosiasi kontribusi pendanaan proyek KFX/IFX.

Dengan demikian, penundaan proyek KFX/IFX pada tahun 2018 dapat dipahami sebagai hasil dari hubungan timbal balik antara tekanan sistem internasional dan dinamika politik domestik Indonesia. Sistem internasional menciptakan batasan struktural berupa tekanan ekonomi global dan hambatan geopolitik, sementara struktur domestik menentukan bagaimana batasan tersebut direspons melalui proses politik, negosiasi anggaran, dan kompromi antar lembaga negara. Kesimpulan ini menegaskan bahwa kebijakan pertahanan dan luar negeri Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks politik domestik yang kompleks, serta memperkuat relevansi teori *The Second Image Reversed* dalam menganalisis kebijakan pertahanan Indonesia dalam kerja sama internasional.

4.2 Rekomendasi

Sebagaimana telah disampaikan dalam kesimpulan, penelitian ini berfokus pada analisis penundaan proyek kolaborasi pengembangan pesawat tempur KFX/IFX pada tahun 2018 dengan menggunakan perspektif *The Second Image Reversed*. Oleh karena itu, penting untuk mengakui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup analisis. Penelitian

ini secara sengaja membatasi periode kajian pada satu titik waktu tertentu, sehingga tidak membahas secara mendalam dinamika kebijakan dan perkembangan proyek sebelum dan setelah tahun 2018. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan basis data sekunder, sehingga analisis yang dilakukan sangat bergantung pada sumber terbuka seperti dokumen resmi, laporan, dan publikasi akademik. Konsekuensinya, penelitian ini belum sepenuhnya menangkap dinamika internal proses pengambilan keputusan melalui perspektif langsung para aktor kebijakan dan pemangku kepentingan utama. Di samping itu, fokus analisis lebih diarahkan pada konteks dan respons politik domestik Indonesia, sehingga dinamika politik domestik Korea Selatan serta peran negara pihak ketiga belum dianalisis secara komprehensif.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika kolaborasi pertahanan internasional. Penelitian lanjutan dapat mengkaji perkembangan proyek KFX/IFX pada periode setelah tahun 2018 untuk menilai sejauh mana perubahan kondisi ekonomi global dan konfigurasi politik domestik memengaruhi keberlanjutan kerja sama tersebut. Selain itu, penggunaan data primer melalui wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan, lembaga legislatif, maupun aktor industri pertahanan dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai mekanisme mediasi tekanan internasional dalam proses politik domestik. Penelitian berikutnya juga dapat mengadopsi perspektif komparatif dengan menganalisis dinamika domestik Korea Selatan atau peran negara pihak ketiga dalam proyek KFX/IFX, sehingga kontribusi teori *The Second Image Reversed* dalam menjelaskan kerja sama pertahanan internasional dapat diuji secara lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, G. I. (2016, Oktober). *KEPENTINGAN INDONESIA MELAKUKAN KERJASAMA MILITER DENGAN KOREA SELATAN DALAM PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR KFX/IFX*, Vol 3. Dipetik July 14, 2025
- Christian Nababan, W. M. (2024, February 29). *Rapim TNI AU, Indonesia Belum Siap kalau Pecah Perang di Indo-Pasifik*. Diambil kembali dari https://www.kompas.id/artikel/rapat-pimpinan-tni-au-bahas-kesiapan-hadapi-ancaman-perang?status=sukses_login?status_login=login&status_login=login
- Defense Mirror. (2018, October 19). *Indonesia Wants to Renegotiate Fighter Jet Cost with South Korea*. Diambil kembali dari Defense Mirror: https://defensemirror.com/news/23536/Indonesia_Wants_to_Renegotiate_Fighter_Jet_Cost_with_South_Korea
- Fitri, A. (2018, Juli). Keberlanjutan Program Pesawat Tempur KFX/IFX dalam Industri Pertahanan Indonesia. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol 10. Dipetik Juli 16, 2025, dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-14-II-P3DI-Juli-2018-1947.pdf
- Global Financial Markets and the Rupiah Exchange Rate*. (2018, Oktober 2018). Diambil kembali dari World Bank Group: https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2018/10/03/global-financial-markets-and-the-rupiah-exchange-rate?utm_source=chatgpt.com
- Gourevitch, P. (1978). The Second Image Reversed. *The International Sources of Domestic Politics*, Vol 32, 881-912. Dipetik Juli 30, 2025, dari <https://www.jstor.org/stable/2706180>
- Huda, A. V., Iswantono, & Kristin, L. (2024, September). Strategi Pertahanan pada Pengembangan Penggunaan Kekuatan Militer dan Non Militer. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol 7. Dipetik Juli 15, 2025, dari <https://jiip.stkipyapisdompui.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/download/5876/4420/38992>
- Ihsanuddin, & Asril, S. (2018, Oktober 19). *Pemerintah Negosiasi Ulang Pengembangan Jet Tempur KFX/IFX dengan Korsel*. Diambil kembali dari Kompas Nasional: <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/19/13372821/pemerintah-negosiasi-ulang-pengembangan-jet-tempur-kfxifx-dengan-korsel>
- Indos. (2020, Juni 6). *KFX/IFX Update and Development*. Dipetik Juli 20, 2025, dari World Defense: <https://world-defense.com/threads/kfx-ifx-update-and-development.7800/>
- International Monetary Fund. (2018, Mei). *Prospek ekonomi di kawasan Asia Pasifik: Ringkasan Eksekutif*. Dipetik September 2, 2025, dari <https://www.imf.org/id/Publications/REO/APAC/Issues/2018/04/16/areo0509>
- Ismiyatun, & Pramudhipta, A. B. (2025, Februari). Analysis of Indonesia's National Interest in Cooperation with South Korea for the Development of KFX/IFX Fighter Aircraft (2008-2023). *Maneggio*, Vol 2, 150-162. Dipetik Juli 16, 2025, dari https://www.researchgate.net/publication/389553215_Analysis_of_Indonesia's_National_Interest_in_Cooperation_with_South_Korea_for_the_Development_of_KFXIFX_Fighter_Aircraft_2008-2023

- Karim, M. F., & Kholid, M. (2025, July 30). *Journal of Contemporary Asia. The Return of Authoritarian Neo-Liberalism in Indonesia?*
- Kemenko Polhukam. (2018, Oktober 19). *Pemerintah Putuskan Renegosiasi Kerja Sama Pesawat Tempur KF-X/IF-X Dengan Korea*. Diambil kembali dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: <https://polkam.go.id/pemerintah-putusan-renegosiasi-kerja-sama-pesawat-tempur-kf-x-if-x-dengan-korea/>
- KEMENTERIAN PERTAHANAN INDONESIA. (2017, Agustus 1). *Kemenhan: Proyek Pesawat Tempur Bisa "Kembalikan" Ahli Dirgantara RI yang Ada di Luar Negeri*. Diambil kembali dari KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA: <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/08/01/kemenhan-proyek-pesawat-tempur-bisa-kembalikan-ahli-dirgantara-ri-yang-ada-di-luar-negeri.html>
- KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA. (2015, Desember 15). *Kerja sama KF-X/IF-X Dilanjutkan, PT DI dan KAI.Ltd Tandatangani Strategic Cooperation Agreement*. Diambil kembali dari KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA: <https://www.kemhan.go.id/2015/12/07/kerja-sama-kf-xif-x-dilanjutkan-pt-di-dan-kai-ltd-tandatangani-strategic-cooperation-agreement.html>
- Kementrian Pertahanan Indonesia. (2015, Mei 4). *Indonesia Komitmen Lanjutkan Kerjasama Pembangunan Pesawat Tempur KFX/IFX Dengan Korsel*. Dipetik July 14, 2025, dari <https://www.kemhan.go.id/2015/05/04/indonesia-komitmen-lanjutkan-kerjasama-pembangunan-pesawat-tempur-kfxifx-dengan-korsel.html>
- Nurrohman, I., Gunawan, D., & Sumarlan, S. (2019, April). PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PROGRAM KFX/IFX INDONESIA-KOREA SELATAN. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol 5, 48-65. Dipetik July 14, 2025
- Permana, Y. (2025). KERJASAMA INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM BIDANG TRANSFER TEKNOLOGI PERTAHANAN KEAMANAN. *DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL*.
- Presiden RI. (2014, Desember 15). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2014. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dipetik Juli 20, 2025, dari <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Perpres-Nomor-136-Tahun-2014.pdf>
- Prihartono, D. (2022, Oktober). Dinamika Diplomasi Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6. Dipetik Juli 15, 2025, dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4088/2574/10150>
- Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA). (2017). *Indonesia Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment Report*. Dipetik September 20, 2025, dari <https://www.pefa.org/node/546>
- Purwanto, Y. (2022, July). KERJA SAMA INTERNASIONAL INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN DALAM PEMBUATAN PESAWAT TEMPUR KFX/IFX. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, Vol 4, 164-169. Dipetik July 14, 2025, dari <https://www.ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/article/view/1117/874>
- Putri Chandra, N. R. (2025, Januari 8). Urgensi Ketahanan Nasional Terhadap Proxy War. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol 4. Dipetik Juli 15, 2025, dari <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9374>
- Sajidah, S. (2023, Oktober 31). *Proyek KFX/IFX Masuk Tahap Pengembangan Prototipe, Diprediksi Selesai Tahun 2026*. Dipetik July 14, 2025, dari <https://www.liputan6.com/global/read/5437860/proyek-kfxifx-masuk-tahap-pengembangan-prototipe-diprediksi-selesai-tahun-2026>

- Sari, M. E. (2022, July 31). *News & Article*. Dipetik July 15, 2025, dari The Habibie Center: https://www.habibiecenter.or.id/contain-news-Urgensi-Modernisasi-Alutsista-dan-Upaya-Menuju-Kemandirian-Industri-Pertahanan_217
- Sari, M. I. (2021, Agustus 13). Encouraging the Renegotiation Process between Indonesia and South Korea for the Continuation of the KFX/IFX Jet Fighter Cooperation Project. Dipetik July 14, 2025
- Sari, N. N., Fatya, A., Sinta, S., Erik, B. S., Rahmi, A., Aisyah, S., & Trisno, B. (2024, September 3). Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara Bagi Bangsa Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol 1, 81-90. Dipetik Juli 15, 2025, dari <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/467/706>
- Sucipto. (2021, April 9). *Melongok Keunggulan Jet Tempur KFX/IFX, Proyek yang Hampir Batal*. Dipetik July 14, 2025, dari SINDOnews.com: <https://nasional.sindonews.com/read/392178/14/melongok-keunggulan-jet-tempur-kfxifx-proyek-yang-hampir-batal-1617966256>
- Syamsurijal, C. A. (2019, Agustus). Public Financial Analysis in the Preparation of Indonesia State Budget (APBN) 2018. *Indonesian Journal of Development Planning*, Vol 3, 203-224. Dipetik September 20, 2025, dari <https://www.neliti.com/publications/289584/public-financial-analysis-in-the-preparation-of-indonesia-state-budget-apbn-2018#cite>
- The Observatory of Economic Complexity. (2023). *Indonesia Reports on Palm Oil*. Dipetik Oktober 14, 2025, dari <https://oec.world/en/profile/country/idn?selector345id=2018>
- Tim Redaksi CNBC Indonesia. (2024, January 9). *Habiskan Rp500 T, Ini Daftar Alutsista yang Dibeli Prabowo*. Dipetik July 14, 2025, dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240109085344-4-503977/habiskan-rp500-t-ini-daftar-alutsista-yang-dibeli-prabowo>
- Widyatmoko, W. G., Almubaroq, H. Z., & Saragih, H. J. (2022, September). Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 6. Dipetik Juli 15, 2025, dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3633>